

BAB III

PEMERINTAHAN KESULTANAN BANTEN

ABAD XVII

Pada Bab ini penulis memaparkan tentang sejarah singkat berdirinya Kesultanan Banten, Periodisasi Kesultanan Banten Abad XVII, Stratifikasi Sosial Masyarakat Banten Abad XVII dan Struktur Pemerintahan Kesultanan Banten. Daerah Banten pada masa awal merupakan sebuah daerah terpencil yang diapit oleh berbagai sungai diantaranya, Cibanten, Cisadane, dan Cidurian. Sejarah Banten sendiri lebih dikenal ketika penetrasi Islam masuk ke wilayah ini dan membentuk sebuah sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan Islam. Pada abad ke-16 M Islam telah menyebar di wilayah ini sampai kepada puncaknya yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Banten Girang pada tahun 1525 M. Adapun tentang keberadaan ataupun masuknya Islam di Banten, sekitar tahun 1512 M. telah ditemukan komunitas Islam di daerah Cimanuk, kota pelabuhan dan batas kerajaan Sunda Hindu dengan Cirebon.¹

A. Sejarah Singkat Berdiri Kesultanan

Secara geografis wilayah Banten merupakan salah satu provinsi yang terletak di Ujung Barat Pulau Jawa Indonesia. Sebelah Barat provinsi ini langsung menghadap ke Selat Sunda, di sebelah Timur berbatasan dengan provinsi DKI. Jakarta, di sebelah Utara Banten berbatasan dengan laut Jawa, di sebelah Selatan provinsi ini langsung menghadap ke laut Lautan Hindia. Dari segi letak geografis provinsi ini memegang peranan perekonomian yang cukup strategis, provinsi ini sendiri merupakan jalur transit yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Sumatera, sekaligus menjadi wilayah alternatif dan wilayah penyangga *hinterland* bagi

¹Hal ini berarti menunjukkan bahwa pada abad 15 M. di wilayah kerajaan Sunda Hindu Padjajaran telah terdapat masyarakat yang memeluk Islam. Lihat Halwany Michrob dan Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*. (Serang: Saudara Serang, 1993).

DKI. Jakarta, dan memiliki Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai jalur akses dunia luar.²

Van Bruinessen mengemukakan pendapatnya melihat dari aspek historis Banten dikenal dengan salah satu daerah berbasis Islam tradisional dan fanatik di Kepulauan Jawa. Maka tak heran jika ketika seseorang membicarakan Banten, akan berasumsi bahwa daerah ini adalah daerah para kiayi, jawara, magis dan debus. Pandangan ini sendiri muncul lantaran kuatnya Islam mengakar dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya, baik secara tradisi, adat budaya dan sosial. Selain itu Banten juga dikenal dengan tingkat religiusitas masyarakatnya yang cukup tinggi.³

Menurut Halwany Michrob, daerah Banten pada masa awal merupakan sebuah daerah terpencil yang diapit oleh berbagai sungai diantaranya, Cibanten, Cisadane, dan Cidurian. Sejarah Banten sendiri lebih dikenal ketika penetrasi Islam masuk ke wilayah ini dan membentuk sebuah sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan oligarki. Pada abad ke-16 M Islam telah menyebar di wilayah ini sampai kepada puncaknya yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Banten Girang pada tahun 1525 M. Adapun tentang keberadaan ataupun masuknya Islam di Banten, sekitar

²Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 penduduk Banten berjumlah 8.096.809 jiwa, dan pada tahun 2003 meningkat 8.956.229 jiwa, dengan komposisi 4.563.563 jiwa laki-laki dan 4.392.666 jiwa perempuan. Sebagian besar penduduk Banten berpendidikan rendah, khususnya yang terletak di wilayah Serang, Lebak dan Pandeglang. Lihat Ardi Lamadi, *Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Provinsi Banten*, dalam <http://ardi-lamadi.blogspot.co.id/> (diakses pada Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 20.30 WIB).

³ Van Bruinessen menyimpulkan bahwa masyarakat Banten memiliki tingkat religiusitas yang tinggi berdasarkan faktor historis, diantaranya, Banten merupakan bekas wilayah Kesultanan Islam, kiyai berperan sebagai elit masyarakat lokal dan memiliki peran signifikan, kultur dan budaya Banten diwarnai oleh nilai-nilai ajaran Islam dan lain sebagainya. Lihat Martin Van Bruinessen : *Shari'a court, Tarekat and Pesantren : Religious Institutions in The Banten*. (Paris: Archipel, 1995), 168.

tahun 1512 M. telah ditemukan komunitas Islam di daerah Cimanuk, kota pelabuhan dan batas kerajaan Sunda Hindu dengan Cirebon. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pada abad 15 M. di wilayah kerajaan Sunda Hindu Padjajaran telah terdapat masyarakat yang memeluk Islam.⁴

Sedangkan pendapat Tome Pires, kawasan Banten dikenal dengan sebutan Banten Girang yang merupakan sebuah bagian Kerajaan Sunda yaitu bagian Kerajaan Tarumanegara. Sebagai daerah sekaligus sebuah bangsa, Banten telah lama dikenal dalam peta masyarakat dunia. Berbagai sumber asing menyebutkan Banten (saat itu dikenal dengan Bantam) sebagai satu dari beberapa daerah yang menjadi rute pelayaran dimana sebagai salah satu daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur. Banten yang berada dijalur perdagangan internasional, berinteraksi dengan dunia luar sejak awal abad Maschi. Kemungkinan pada abad ketujuh Banten sudah menjadi pelabuhan internasional. Berbagai konsekuensi logisnya, Islam diyakini telah masuk dan berakulturasi dengan budaya setempat.⁵

Penetrasi Islam di wilayah ini mulai menyebar secara signifikan ketika datangnya Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) dan putranya pangeran Sabakingking (Maulana Hasanuddin) yang mulai menyebarkan Islam di wilayah ini. Dalam proses

⁴ Halwany Michrob dan Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*. (Serang: Saudara Serang, 1993), 50.

⁵ Sebagaimana diceritakan dalam berita Tome Pires pada tahun 1513. Proses Islamisasi Banten, yang diawali oleh Sunan Ampel, kemudian diteruskan oleh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Fase sejarah penting menguatnya pengaruh Islam terjadi ketika Bupati Banten menikahkan adiknya, yang bernama Nyai Kawunganten, dengan Syarif Hidayatullah yang kemudian melahirkan dua anak yang diberi nama Ratu Wulung Ayu dan Hasanuddin sebagai cikal bakal dimulainya fase sejarah Banten sebagai Kesultanan Banten bersama putranya inilah Sunan Gunung Jati melebarkan pengaruh dalam menyebarluaskan agama Islam ke seluruh tatar Sunda hingga saatnya Sang Wali kembali ke Cirebon. Lihat Husein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sedjarah Banten*. (Jakarta : Djambatan, 1983), 67.

menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk pribumi, Maulana Hasanuddin mempergunakan cara-cara yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat yakni dengan mengadu kesaktian. Dengan metode seperti inilah Maulana Hasanuddin berhasil menaklukan *Pucuk Umun* yakni punggawa dari Padjajaran beserta 800 *ajar* melalui adu kesaktian, dan bersedia memeluk agama Islam dan menjadi pengikut Hasanuddin. Dengan takluknya *Pucuk Umun* terhadap Hasanuddin, hal ini telah menandakan berakhirnya masa kekuasaan Kerajaan Sunda Hindu Padjajaran atas wilayah Banten.⁶

Atas pemahaman geo-politik yang mendalam Sunan Gunung Jati menentukan posisi Keraton, Benteng, Pasar dan Alun-alun yang harus dibangun di dekat kuala Sungai Banten yang kemudian diberi nama Keraton Surosowan. Kurang lebih dalam kurun waktu 26 tahun, Banten menjadi sebuah kerajaan yang besar dan maju. Pada tahun 1552 Masehi, Banten bukan hanya sekedar sebuah Kadipaten tetapi diubah menjadi negara bagian Kesultanan Demak dengan dinobatkannya Hasanuddin sebagai Sultan dari Kesultanan Banten dengan gelar Maulana Hasanuddin Penembahan Surosowan.⁷

Maulana Hasanuddin sebagai pemimpin di Kesultanan Banten, sekaligus penyebaran dakwah-dakwah Islam. Kepercayaan masyarakat sebelumnya dikenal sebagai masa Banten Girang bagian dari Kerajaan Sunda dengan menganut kepercayaan Hindu-Budha di bawah Kesultanan Banten yang berlandaskan asas Islam. Adanya kerjasama Sunda-Portugal dalam bidang ekonomi dan politik, hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugal dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Trenggana, bersama dengan Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527 yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan

⁶ Else Ensering, *Banten in Times of Revolutions*. (Paris: Archipel, 1995), 131-132.

⁷ Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 2004), 34.

Sunda.⁸ Ketika sudah menjadi Pusat Kesultanan Banten, sebagaimana dilaporkan oleh J. de Barros, Banten merupakan pelabuhan besar di Jawa, sejajar dengan Malaka. Kota Banten terletak di pertengahan pesisir sebuah teluk (Teluk Banten), yang lebarnya sampai tiga mil. Kota ini panjangnya 850 depa. Di tepi laut kota itu panjangnya 400 depa, masuk ke dalam ia lebih panjang. Melalui tengah-tengah kota ada sebuah sungai yang jernih, dimana kapal jenis *jung* dan *gale* dapat berlayar masuk.⁹

Pada sebuah pinggir kota itu ada sebuah benteng yang dindingnya terbuat dari bata dan lebarnya tujuh telapak tangan. Bangunan-bangunan pertahanannya terbuat dari kayu, terdiri dari dua tingkat, dan dipersenjatai dengan senjata yang baik. Di tengah kota terdapat alun-alun yang digunakan untuk kepentingan kegiatan ketentaraan dan kesenian rakyat dan sebagai pasar di pagi hari. Keraton Sultan terletak di bagian selatan alun-alun. Di sampingnya terdapat bangunan datar yang ditinggikan dan beratap, disebut *Srimanganti*, yang digunakan sebagai tempat Sultan bertatap muka dengan rakyatnya. Di sebelah barat alun-alun didirikan sebuah Masjid Agung.¹⁰

Sekitar awal abad ke-17 Maschi, Banten merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur perniagaan internasional di Asia. Tata administrasi modern pemerintahan dan kepelabuhan sangat menunjang bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat.

⁸Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut, selain itu ia juga telah melakukan kontak dagang dengan raja *Malangkabu* (Minangkabau, Kerajaan Inderapura), Sultan Munawar Syah dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Lihat Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 2004), 35.

⁹Sepanjang pinggir kota ada sebuah anak sungai, di sungai yang tidak seberapa lebar itu hanya perahu-perahu kecil saja yang berlayar masuk. Lihat Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008).

¹⁰Husein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sedjarah Banten*. (Jakarta: Djambatan, 1983), 84.

Ketika orang Belanda tiba di Banten untuk pertama kalinya, orang Portugis telah lama masuk ke Banten. Kemudian orang Inggris mendirikan loji di Banten dan disusul oleh orang Belanda. Selain itu, orang-orang Perancis dan Denmark pun pernah datang di Banten. Dalam persaingan antara pedagang Eropa ini, Belanda muncul sebagai pemenang. Orang Portugis melarikan diri dari Banten (1601), setelah armada mereka dihancurkan oleh armada Belanda di perairan Banten. Orang Inggris pun tersingkirkan dari Batavia (1619) dan Banten (1684) akibat tindakan orang Belanda.¹¹ Hal senada juga dijelaskan dalam Sajarah Banten mengenai keruntuhan Kesultanan yang diawali oleh perlawanan Sultan Haji terhadap orangtuanya tahun 1680. Sultan Ageng Tirtayasa yang mengakibatkan kehancuran Banten.

Kita bisa melihat bentuk wujud dari interaksi dan hubungan budaya dan keterbukaan masyarakat Banten dengan dunia luar pada tempo dulu dapat dilihat dari berkembangnya perkampungan penduduk yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara seperti Melayu, Ternate, Banjar, Makassar, dan dari Jawa sendiri serta berbagai bangsa dari luar Nusantara seperti Pegu (Birma), Syam, Persia, Arab, Turki, Bengali, dan Cina di Kesultanan Banten.¹² Dalam membangun usahanya, Maulana Hasanuddin sebagai Sultan Banten pertama (1552- 1570), akan tetapi ia sudah mejadi Sultan di Banten sejak tahun 1525, menitikberatkan pada pengembangan sektor perdagangan dengan lada sebagai komoditas utama yang diambil dari daerah Banten sendiri serta daerah lain di wilayah kekuasaan Banten, yaitu Jayakarta (Jakarta), Lampung, dan terjauh yaitu dari Bengkulu.¹³ Perluasan pengaruh juga menjadi perhatian Sultan Hasanuddin melalui pengiriman ekspedisi ke pedalaman dan

¹¹Edi S. Ekadjati, *Kesultanan Banten dan Hubungannya dengan Wilayah Luar, dalam Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), 97.

¹²Van Leur, *Indonesian Trade And Society*. (The Hague Bandung: Van Hoeve, 1955), 133-134.

¹³Uka Tjandrasmita, *Banten sebagai Pusat Kekuasaan dan Niaga Antarbangsa, dalam Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), 323.

pelabuhan-pelabuhan lain. Sunda Kelapa sebagai salah satu pelabuhan terbesar berhasil ditaklukkan pada tahun 1527 dan takluknya Sunda Kelapa menjadi "Jayakarta" (setelah jatuh ketangan VOC Belanda berubah menjadi Batavia kemudian berubah lagi menjadi Jakarta).¹⁴

Sunda Kelapa merupakan Pelabuhan utama Kerajaan Padjadjaran, dengan jatuhnya Sunda Kelapa ke Kesultanan Banten praktis kerajaaan Padjadjaran kehilangan wilayah pesisir utamanya yang sebelumnya Pelabuhan Caruban oleh Kesultanan Demak dan kemudian berdirinya Kesultanan Cirebon. Sebelumnya Kerajaan Padjadjaran hendak menjalin kerjasama dengan orang-orang Portugis untuk menghadapi pengaruh Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten di wilayah pesisir Utara. Paska wafatnya Sultan Maulana Hasanuddin, pemerintahan dilanjutkan oleh puteranya Sultan Maulana Yusuf (1570-1580), putera pertamanya dari pernikahan dengan Ratu Ayu Kirana, putri Sultan Demak. Kemasyuran Banten makin meluas ketika politik ekspansinya berhasil pula menaklukkan Kerajaan Padjadjaran di Pakuan yang dibantu oleh Kesultanan Cirebon pada tahun 1579 sehingga Kerajaan Padjadjaran akhirnya benar-benar runtuh.¹⁵

Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, sektor pertanian berkembang pesat dan meluas hingga melewati daerah Serang sekarang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi sawah-sawah tersebut dibuat terusan irigasi dan bendungan. Danau Tasikardi (buatan) merupakan sumber pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk kota, sekaligus sebagai sumber pengairan bagi daerah pesawahan di sekitar kota. Sistem filtrasi air dengan metode

¹⁴ Dengan takluknya Sunda Kelapa, Banten memegang peranan strategis dalam perdagangan lada yang sekaligus menggagalkan usaha Portugis di bawah pimpinan Henrique de Leme dalam usahanya menjalin kerjasama dengan Raja Sunda/Padjadjaran, lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900; Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid-1*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 33-34.

¹⁵ Atja, *Carita Purwaka Caruban Nagari; Karya Sastra Sebagai Sumber Pengtahuan Sejarah*. (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa 1986), 189.

pengendapan di Pengindelan Abangan dan Pengindelan Putih merupakan bukti majunya teknologi air pada masa tersebut.¹⁶ Pada masa Sultan Maulana Yusuf memerintah, perdagangan Banten sudah sangat maju dan Banten bisa dianggap sebagai sebuah kota pelabuhan emperium, bisa dilihat dengan adanya tempat barang-barang dagangan dari berbagai penjuru dunia digudangkan dan kemudian didistribusikan kembali baik ke luar daerah maupun sekitar Nusantara. Tumbuh dan berkembangnya pemukiman-pemukiman pendatang dari mancanegara terjadi pada masa ini dari berbagai negara.¹⁷

Masa kejayaan Banten selanjutnya diteruskan oleh puteranya Maulana Muhammad paska mangkatnya Maulana Yusuf pada tahun 1580. Maulana Muhammad dikenal sebagai Sultan yang amat sholeh. Untuk kepentingan penyebaran agama Islam ia banyak membangun fasilitas pengajaran agama Islam untuk masyarakat Kesultanan Banten. Kesejahteraan Masjid dan kualitas kehidupan keberagamaan sangat mewarnai masa pemerintahannya walaupun tidak berlangsung lama karena kematiannya yang tragis dalam perang di Palembang pada tahun 1596 dalam usia sangat muda, sekitar 25 tahun. Paska mangkatnya Maulana Muhammad Banten mengalami masa deklinasi ketika konflik dan perang saudara mewarnai keluarga Kesultanan khususnya selama masa perwalian Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir yang baru berusia lima bulan ketika ayahandanya wafat.¹⁸

¹⁶Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 2004), 38.

¹⁷Kampung Pekojan umpamanya untuk para pedagang Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki, yang terletak di sebelah barat Pasar Karangantu. Kampung Pecinan untuk para pedagang Cina, yang terletak di sebelah barat Masjid Agung Banten. Lihat Halwany Michrob dan Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*. (Serang: Penerbit Sodara, 1993), 83.

¹⁸Puncak perang saudara bermuara pada peristiwa Pailir, dan setelahnya Banten mulai kembali menata diri untuk membangun pemeruntahan. Lihat Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 2004), 42.

Masa perwalian Sultan Muda berakhir pada bulan Januari 1624, maka Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir diangkat sebagai Sultan Banten (1596-1651). Sultan yang baru ini dikenal sebagai orang yang arif bijaksana dan banyak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Bidang pertanian, pelayaran, dan kesehatan rakyat mendapat perhatian utama dari Sultan Banten ini. Ia berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara Islam. Dialah penguasa Banten pertama yang mendapat gelar Sultan dari penguasa Arab di Mekkah (1636). Sultan Abdul Mafakhir bersikap tegas terhadap siapa pun yang mau memaksakan kehendaknya kepada Banten. Misalnya menolak kemauan VOC yang hendak memaksakan monopoli perdagangan di Banten.¹⁹

Pada tanggal 10 Maret 1651, Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Kenari, berdekatan dengan makam sang ibu dan putera kesayangannya yaitu Sultan Abdul Al-Ma'ali. Sultan Abdul Al Ma'ali meninggal pada tahun 1650, ia wafat karena sakit. Dari pernikahannya dengan Ratu Martakusuma, puteri dari Pangeran Jayakarta, Sultan Abdu Al-Ma'ali yang bergelar sebagai Pengeran Pekik dikaruniai lima anak, yaitu Ratu Kulon atau Ratu Pembayun, Pangeran Surya, Pangeran Arya Kulon, Pangeran Lor dan Pangeran Raja. Setelah Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir meninggal, sebagai penggantinya, diangkat Pangeran Surya, yang

¹⁹ Akibatnya kebijakannya ini praktis masa pemerintahannya diwarnai oleh ketegangan hingga blokade oleh VOC terhadap Banten, kemudian Penggepungan Belanda di Tanara dapat digagalkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Tubagus Singaraja, penguasa Banten di sana, sedangkan penggepungan di perairan dan Pelabuhan Banten baru dapat digagalkan setelah ada siasat baru. Atas usul wangsadipa, para prajurit Banten memuatkan sampah dan rumput kering ke atas beberapa perahu kecil dan membasahinya dengan minyak bakar. Malam harinya, perahu perahu tersebut diluncurkan menuju kapal VOC. Dalam jarak yang dekat barulah rumput kering itu dibakar. Peristiwa ini disebut Pabaranang. Lihat Edi S. Ekadjati, *Wawacan Sejarah Galuh*. (Bandung: EEFEQ, 1977).

bergelar Pangeran Adipati Anom Pangeran Surya, putra dari Abu al-Ma'ali Ahmad, menjadi Sultan ke-5 pada tanggal 10 Maret 1651.²⁰

Seperti yang sudah disinggung dibab sebelumnya, bahwasanya Kesultanan Banten menurut sumber lokal pernah dipimpin sebanyak 22 penguasa mulai dari Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) sampai kepada Sultan Rafiuddin, akan tetapi dalam sumber lain menjelaskan Kesultanan pernah dipimpin oleh 19 orang Sultan, disebabkan tidak dimasukkannya Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin tetapi dianggap sebagai pendiri dan Sultan Abul Ma'ali Ahmad disebabkan meninggal terlebih dahulu sebelum ayahnya wafat (Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir) kemudian ada Sultan Rafiuddin yang dianggap sebagai Sultan buatan Kompeni untuk memecah membelah keluarga Kesultanan Banten. Sehingga sumber tersebut mengakui hanya 19 Sultan.²¹

Walaupun kerajaan ini berlandaskan Islam, asas kerukunan toleransi dan pluralisme beragama terbuka bagi masyarakat. Kesultanan Banten merupakan Kesultanan yang egaliter dan terbuka bagi semua golongan dan agama, setidaknya sampai saat ini kita dapat melihat klenteng Tionghoa yang didirikan pada masa Sunan Gunung Djati sampai saat ini masih terawat dengan baik dan menjadi situs cagar budaya nasional. Di bawah ini silsilah penguasa Kesultanan Banten menurut sumber lokal.

Daftar nama Penguasa dan Sultan-sultan yang memerintah di Banten.

1. Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah)
1525-1552
2. Sultan Maulana Hasanuddin
1555-1570

²⁰ Berhasil mempertahankan kejayaan dan terus berusaha memperluas wilayah teritorial Kesultanan Islam Banten. Lihat Halwany Michrob dan Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*. (Serang: Penerbit Sodara, 1993).

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Yadi Ahyadi, Sejarawan Banten, Sabtu 30 September 2017, di Bantenologi kampus UIN "SMH" Banten, Serang-Banten

3. Sultan Maulana Yusuf
1570-1580
4. Sultan Maulana Muhammad
1580-1596
5. Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir
1596-1624
6. Sultan Abul Ma'ali Ahmad
1624-1651
7. Sultan Abul Fath Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa)
1651-1682
8. Sultan Abu Nasr Abdul Kahar (Sultan Haji)
1682-1687
9. Sultan Abdul Fadhal
1687-1690
10. Sultan Abul Mahasin Zainul Abidin
1690-1733
11. Sultan Muhammad Syifai Zainul Arifin
1733-1750
12. Sultan Syarifuddin Ratu Wakil
1750-1752
13. Sultan Muhammad Wasi Zainul Alimin
1752-1753
14. Sultan Muhammad Arif Zainul Asyikin
1753-1773
15. Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliyuddin
1773-1799
16. Sultan Muhyidin Zainussolihin
1799-1803
17. Sultan Muhammad Ishak Zainul Muttakin
1803-1808
18. Sultan Wakil Pangeran Natawijaya
1803-1803
19. Sultan Agiluddin Aliyuddin II
1803-1808
20. Sultan Wakil Pangeran Sura Manggala
1808-1809

21. Sultan Muhammad Shapiyuddin
1809-1813
22. Sultan Muhammad Rafiuddin
1813-

Kesultanan Banten merupakan kerajaan yang berlandaskan asas-asas Syariat Islam, dengan demikian secara otomatis perkembangan Islam pada masa ini berkembang sangat pesat. Perkembangan Islam yang signifikan pada masa ini diperoleh dengan dukungan politik pemerintah yang berkuasa saat itu. Seperti halnya menurut Thomas Aquinas, agama rakyat menuruti agama raja (penguasanya).²² Begitupun dengan Kesultanan Banten yang mana masyarakatnya patuh dan mengikuti agama rajanya sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap pemimpinnya.

Teori seperti ini nampaknya berlaku pada masyarakat Banten pada masa itu. Perkembangan pesat tersebut ditandai dengan tumbuh dan bermunculannya kelompok tarekat-tarekat, pesantren-pesantren di pedesaan-pedesaan di wilayah Banten, serta kultur masyarakat yang memegang teguh agama dan tradisi budaya mereka. Sebagai Kerajaan berbasis Kesultanan Islam (Banten) tentunya posisi Ulama ataupun Kiyai memiliki peran yang signifikan, dan menduduki struktur sosial teratas setelah Sultan dalam masyarakat Banten. Para ulama merupakan perpanjangan tangan dari Sultan dalam proses Islamisasi di pedesaan-pedesaan, bahkan peran ulama lebih dari sekedar orang kepercayaan Sultan, mereka menjadi guru spiritual para Sultan dan memberikan masukan serta restu.²³

Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, ditandai dengan mulai berdatangnya kapal-kapal dagang Belanda yang berlabuh di

²²Teori ini dikenal dengan teori teokratis, dimana negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Thomas Aquinas merupakan salah satu pengusung teori ini. Lihat F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Bina Cipta, 1980), 152-153.

²³ Syaikh Muhammad Jamaluddin Qosim Addimsiyiq, *Al-Mau'izatul Mu'minin min ihya'ulumuddin*. (Beirut: Darunnafais, 1981), 40.

wilayah Jawa dan pelabuhan Karangantu, Kesultanan Banten secara bertahap mengalami fase kemunduran. Perusahaan dagang Belanda *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang kemudian mendirikan markas besarnya di pantai Utara Jayakarta berusaha melakukan monopoli perdagangan dengan berbagai cara. Masuknya Belanda dalam teritorial Banten mengancam stabilitas keamanan dan perekonomian Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada masa itu (1651-1682 M) telah melakukan beberapa kali konfrontasi penyerangan secara langsung ke Batavia, namun selalu mengalami kegagalan. Bahkan sebaliknya pihak kolonial Belanda dapat mematahkan penyerangan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjebloskannya ke dalam penjara. Salah satu taktik yang digunakan Belanda dalam menangkap Sultan Ageng Tirtayasa, adalah dengan menggunakan taktik adu domba *divide et impera* antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji. Dengan taktik tersebut Belanda berhasil menguasai wilayah Banten.²⁴ Selanjutnya akan dibahas secara terperinci mengenai perodesasi Kesultanan Banten sekitar abad XVII.

B. Perodesasi Kesultanan Banten Abad XVII

Dalam perodesasi Kesultanan Banten abad XVII ini penulis banyak menggunakan sumber dari Claude Guillot dalam bukunya "*Banten: Sejarah dan Peradaban Abad XV-XVII*", yang banyak mengkaji mengenai peristiwa Sejarah di Kesultanan Banten. Dalam sebuah kerajaan atau kesultanan akan ada seorang yang jadi pemimpin, dan ditentukan secara regenerasi dari garis keluarganya terutama dari anak laki-laki yang pertama, sehingga kerajaan tersebut terus berjalan dan berkembang, tetapi tidak sedikit juga yang mengalami kehancuran bahkan keruntuhan akibat dari perselisihan antar anak-anak keturunan kerajaan yang saling memperebutkan kekuasaan orangtuanya sehingga berdampak kepada kesetabilan ditubuh internal kerajaan itu sendiri. Ada juga kasus dimana putera mahkota melawan atau memberontak ayahnya

²⁴Halwany Michrob dan Mudjahid Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*. (Serang: Saudara Serang, 1993), 151-152.

sendiri akibat campur tangan orang ketiga, seperti halnya Kesultanan Banten yang akan dibahas dibawah ini.

Membahas Banten tidak akan bisa dipisahkan dengan Banten Girang sebagai cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten yang mengalami sebuah perubahan besar di peralihan abad ke-15. Menurut teks berbahasa Sunda, *Carita Parahyangan*, diduga hancurnya Banten Girang dan berhentinya hampir seluruh kegiatan ekonomi, disebabkan tidak ada satupun indikasi yang memungkinkan dugaan pada bencana alam, disimpulkan bahwa Banten Girang musnah dalam perang yang dilakukan oleh pasukan kerajaan Padjajaran yang beribu kota di Pakuan yang sekarang menjadi kota Bogor.²⁵ Pergantian kekuasaan di negeri Sunda Padjajaran berakibat sangat buruk dan ada indikasi bahwa penguasa Padjajaran ingin mengalihkan semua kegiatan niaga dari Banten ke pelabuhan-pelabuhan yang lebih dekat dengan ibu kota: Kelapa dan kemungkinan besar sebuah pelabuhan yang terletak di muara Sungai Citarum.²⁶

Menurut Tome Pires, melalui hasil analisis benda-benda arkeologis, semua menunjukkan bahwa Banten Girang sedikit demi sedikit berhasil memulihkan perniagaannya dengan memanfaatkan redupnya penguasa atasan. Sekitar tahun 1500, Banten Girang,

²⁵ Kerajaan Padjajaran didirikan tahun 1333 oleh beberapa bangsawan dari Galuh. yang untuk pertama kalinya menyatukan daerah Jawa Barat, dari selatan sampai utara di bawah kekuasaan tunggal. Menurut kronik yang baru disebutkan, yang teksnya sering acap kali kabur, kerajaan ini melancarkan pertarungan sengit melawan pelabuhan-pelabuhan pesisir utara, termasuk Banten Girang yang muncul dengan nama “Wahanten Girang”. Jadi bisa diperkirakan bahwa peristiwa-peristiwa ini yang menyebabkan kehancuran Banten Girang sekitar tahun 1400. Lihat Edi S. Ekadjati, *Wawacan Sejarah Galuh*. (Bandung: EEFEQ, 1977).

²⁶ Kemungkinan besar keadaan inilah yang digambarkan Tome Pires ketika ia menyatakan bahwa pelabuhan paling aktif di Jawa Barat terletak di Kelapa dan di sana ditemukan peninggalan arkeologis. Lihat Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 2004).

menemukan kembali hampir seluruh kegemilangannya di masa lampau. Dibuktikan dengan panduan pelayaran China *Shunfeng Xiansong*, yang ditulis pada masa itu, membuktikan bahwa pelabuhan Banten kembali menjadi salah satu pusat penting perniagaan China di Nusantara. Suatu hal yang dipertegas dalam sumber-sumber Portugis dari awal abad ke-16. Dengan tumbangnya Malaka di tahun 1511 mungkin mempercepat pulihnya kembali ekonomi Banten Girang.²⁷

Diaspora para pedagang Muslim dari Timur Tengah terjadi sejak sebelum Kesultanan Banten berdiri, sebagian dari mereka pindah ke Banten Girang, dikarenakan kemakmuran negeri Banten Girang saat itu dan tidak ada lagi raja di Pakuan, tak luput menjadi incaran bagi orang Jawa, dalam hal ini kemaharajaan niaga Demak, yang kala itu menggabungkan pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jawa. Sejak paling lambat tahun 1520, kerajaan ini melancarkan beberapa serangan militer yang gagal terhadap negara-negara kecil ini.²⁸

Banten Girang dihadapkan pada ancaman besar ini, para penguasa Sunda di Banten meminta bantuan kepada orang Portugis di Malaka. Mungkin karena terburu-buru, sehingga pada tahun 1522 mereka ditawarkan kemudahan-kemudahan untuk berniaga dan biaya pembangunan sebuah benteng pertahanan, asalkan mereka bersedia menempatkan satu pasukan di dalamnya Sungai Cisadane, di perbatasan Barat kerajaan, untuk mencegah serangan yang datang dari Demak. Akan tetapi orang Portugis tidak langsung menanggapi usulan ini, di penghujung tahun 1526, dengan bantuan dari dalam oleh Sunan Gunung Jati, putranya Hasanuddin dan Ki Jongjo salah seorang petinggi yang menjadi muallaf dan memihak kepada kaum Islam yang tercantum dalam teks asli perjanjian tahun

²⁷Claude Guillot, Banten: *Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 29.

²⁸Claude Guillot, Nurhakim Lukman, Wibisono Sonny. *La principauté de Banten Girang*. Archipel. Volume 50, 1995, 13.

1522 antara kerajaan Sunda dan Portugis.²⁹ Keramaian Banten Girang bertambah, juga karena para pedagang Eropa yang datang dari arah ujung Selatan Afrika dan Samudera Hindia mau tidak mau harus melalui Selat Sunda. Di samping itu, pelabuhan Banten Girang pun dilalui oleh kapal-kapal dagang yang datang dari dan menuju ke arah Barat laut melalui Selat Bangka.³⁰

Menurut Joao de Barros, Jorge Albuquerque, “Kapitan” kota Malaka mengirim sebuah kapal yang dipimpin oleh Henrique Leme menghadap raja Sunda, untuk menjalankan urusan perdagangan. Pada saat mereka tiba di pelabuhan Batavia, raja tersebut menerima orang Portugis dengan baik, guna memperoleh bantuan dalam peperangan yang sedang berlangsung melawan orang Islam. Untuk memperkuat hubungan dagang, orang Portugis diberi hak untuk membangun sebuah benteng dan dijamin mereka boleh memuat lada sejumlah yang mereka hendaki. Selain itu raja berjanji memberikan 1,000 karung lada setiap tahunnya kepada raja Portugal mulai hari dibangunnya benteng tersebut, perjanjian ini dibuat secara tertulis dan tiga orang menteri setempat turut ambil bagian dalam pembicaraan tersebut: Mandari Tadam, Tamungo Sague de Pate dan Bengar, syahbandar setempat. Atas perintah raja mereka mengantar Leme ke tempat akan dibangunnya benteng tersebut, di sebelah kanan muara sungai, di kawasan yang dinamai Calapa (Sunda Kalapa).³¹

²⁹ Claude Guillot, *La nécessaire relecture de l'accord luso-sundanais de 1522*, (Archipel. Volume 42, 1991), 53.

³⁰ Edi S. Ekadjati, *Wawacan Sejarah Galuh*. (Bandung: EEFEQ, 1977), 97.

³¹ Kemudian Portugis mendirikan sebuah benteng, selanjutnya Leme pulang ke Malaka. Jorge Albuquerque menilai hal itu sangat penting dan menulis kepada raja Portugal untuk meminta persetujuan. Joao III menyetujui usaha tersebut dan mempercayakan pelaksanaannya kepada Francisco de Sa yang berangkat dengan armada yang dipimpin oleh Vasco de Gama wakil raja di India yang baru. Karena Vasco da Gama kemudian wafat, maka Francisco de Sa diberi tugas yang lain dan tinggal beberapa waktu di Goa. Lihat Claude Guillot, *The Sultante of Banten*. (Jakarta: Gramedia Book Publishing Division, 1990).

Ketika Francisco de Sa tiba di Malaka. Armada portugis sedang mempersiapkan serangan terhadap Pulau Bintan. Di bawah pimpinan Pero Mascarenhas. Francisco de Sa dengan armadanya bergabung, dan setelah selesai serangannya baru berangkat menuju Jawa dan mendarat di Sunda dan armadanya terserang badai. salah seorang kapten yang selamat Duarto Coelho berhasil mendarat di Kelapa, sementara kapalnya terdampar di situ semua penumpang kapal diserang oleh orang-orang Islam yang beberapa hari sebelumnya telah merebut kota itu dari raja bukan Islam sahabat orang Portugis.³² Sedangkan menurut Diogo do Couto, setelah ikut mengambil bagian dalam ekspedisi pimpinan Pero Mascarenhas melawan Bintan, Francisco de Sa berlayar menuju “Sunda” untuk membangun sebuah benteng. Selama pelayarannya armada yang ia pimpin diserang badai sehingga kapal-kapalnya terpecah-pecah selama beberapa hari. Tiga diantaranya sebuah kapal yang besar pimpinan Duarte Coelho serta dua kapal lainnya, dengan susah payah berhasil mencapai “Pelabuhan Sunda”.

Pada waktu terserang badai itulah salah satu kapalnya terdampar, dan ketiga puluh orang Portugis yang ada di dalamnya berenang menuju ke daratan, tetapi di pantai itu mereka dibunuh oleh musuhnya, orang-orang Islam. Sebenarnya raja yang menghendaki dibangunnya benteng itu sudah meninggal dan musuh yang diperangnya telah merebut daerahnya. Pada waktu itu musuh yang jumlahnya besar sudah berada di kota “Bantam”, kota terpenting di kerajaannya, dan berusaha menaklukkannya. Begitu musuhnya melihat kedatangan armada Portugis, timbul niat mereka untuk membalas dendam, karena mereka tahu bahwa raja yang meninggal itu telah memberi izin pada Portugis membangun benteng di Pelabuhan tersebut. Ajaibnya, kapal besar dan satu kapal lainnya tidak terdampar. Setelah menyaksikan apa yang menimpa

³² Claude Guillot, *La nécessaire relecture de l'accord luso-sundanais de 1522*. Archipel. Volume 42, 1991, 76.

para penumpang kapal yang terdampar itu dan tanpa mengetahui nasib Francisco de Sa, Duarte Coelho bertolak kembali ke Malaka.³³

Dalam penafsiran teks tersebut para sejarawan (Veth, Rouffac, Hoesein Djajadiningrat, De Haan dll) berpendapat untuk menganggap kerajaan Sunda yang disebut adalah Padjajaran dan bersemayam di Pakuan dan pelabuhan Sunda adalah Kelapa (Jakarta), semuanya terjadi di wilayah Pakuan dan Kelapa. Di Kelapa Leme berunding dan mendirikan Padrao, dan di Kelapa pula terjadi pembunuhan para pelaut kapal Duarte Coelho.³⁴

Kerajaan Islam (Demak) menempati Banten Girang, yang tetap menjadi negara bagian dan jatuh kembali ke dalam kekuasaan Jawa. Kemudian Demak mengangkat Hasanudin sebagai pemimpin. Ia memerintah selama beberapa tahun di Banten Girang sebelum ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati, memerintahkan untuk memindahkan Istana ke pelabuhan Banten. Situs Banten Girang tidak benar-benar ditinggalkan dan bekas istana kemudian digunakan sebagai pesanggrahan bagi para penguasa Islam, paling tidak sampai di penghujung abad ke-17.³⁵ Pindahan istana terjadi pada tanggal 1 Muharam tahun 933 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1526.³⁶

³³ Ternyata Francisco de Sa beserta kapalnya terbawa badai sampai ke pantai Jawa. Ia berhasil kembali menghimpun kapal-kapal lainnya di Panarukan dan mengirim utusan untuk memperingatkan raja akan janji pendahulunya, akan tetapi raja baru menolaknya dan Francisco de Sa mencoba menyerangnya, tetapi ia menghadapi pertahanan yang begitu kuat dan sejumlah anak buahnya meninggal sehingga ia mengundurkan diri dan kembali ke Malaka.

³⁴ Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 34.

³⁵ Pada dasarnya dinasti Islam (Demak) bukanlah pendiri Banten. Sebenarnya Banten Girang sebuah Negara yang telah memiliki sejarah panjang yang kemakmurannya sejak lama sudah tertumpu pada penghasilan biji lada dan perniagaan internasional.

³⁶ Dalam pemindahan pusat pemerintahan Banten ke pesisir tersebut, Sunan Gunung Jati menentukan posisi dalam istana, benteng, pasar dan alun-alun yang harus dibangun dideket kuala Sungai Banten yang

Menurut sumber lokal dalam *Tradisi Cirebon*, peranan Sunan Gunung Jati sebagai pendiri Kesultanan Banten sangat menonjol. Seperti telah dikemukakan diatas perintis berdirinya Kesultanan Banten ini diawali dengan kegiatan penyebaran agama Islam dan pembentukan kelompok masyarakat muslim, dan penguasaan daerah secara politik pun dijalankan sampai akhirnya berdiri suatu pemerintahan disebut Kesultanan Banten sebelumnya disebut Banten Girang.³⁷ Sedangkan menurut sumber lokal dalam *Tradisi Banten*, sebagaimana tertulis dalam *Sajarah Banten*, Maulana Hasanuddin dianggap sebagai pendiri Kesultanan Banten. Dan Sunan Gunung Jati lebih dipandang sebagai ayah yang membimbing puteranya hingga sanggup mendirikan sebuah kerajaan yang berdiri sendiri. Hal ini terlihat dalam silsilah Sultan Banten yang diawali dengan nama Maulana Hasanuddin sebagai pendiri Kesultanan Banten.³⁸

Maulana Hasanuddin menikah dengan Putri Sultan Demak, Trenggana, bernama Ratu Nyawa. Dari perkawinan itu lahirlah dua orang putra laki-laki, yakni Maulana Yusuf dan Pangeran Aria. Semasa kecilnya putra Maulana Hasanuddin yang bungsu dititipkan untuk dididik di Jepara, maka ia dikenal dengan gelar Pangeran Jepara. Dan Sultan Hasanuddin menyebarkan usaha mengembangkan agama Islam hingga ke Lampung, yang terkenal sebagai daerah penghasil lada, dan berkat lada lah kelak Banten menjadi penting sebagai kota pelabuhan dagang. Kemudian Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 M.³⁹

kemudian diberi nama Surosowan, tempat ini kemudian menjadi ibu kota Kesultanan Banten. Lihat Halwany Michrob, dan Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*. (Serang: Penerbit Sodara, 1993).

³⁷ Husein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sedjarah Banten*. (Jakarta: Djambatan, 1983), 214.

³⁸ Halwany Michrob, dan Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*. (Serang: Penerbit Sodara, 1993), 68.

³⁹ Kemudian dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Banten, yang kemudian dikenal sebagai makam Sultan-Sultan Banten. Dalam berita Banten, Hasanuddin terkenal dengan nama anumertanya, Pangeran Saba Kingking, sesuai dengan nama desa atau kota tempat ia dimakamkan,

Maulana Yusuf sebagai putra tertua dari Maulana Hasanuddin menggantikan ayahnya, sebagai pemimpin Banten dan menyebarkan agama Islam ke daerah Selatan Banten. Pada tahun 1579 Maulana Yusuf berhasil mengalahkan ibu kota Padjajaran di Pakuan. Menurut *Sajarah Banten*, banyak penguasa dan alim ulama (tokoh agama) yang ikut gerakan melawan Pakuan. Pimpinan ulama dipegang oleh Maulana Judah (dari Jedah, Arab Saudi) dan Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580.⁴⁰

Putra Maulana Yusuf, yaitu Maulana Muhammad menggantikan ayahandanya, karena masih kecil, maka masa awal pemerintahannya Maulana Muhammad diwakili oleh Pangeran Aria Jepara, adik Maulana Yusuf, namun kehadirannya sebagai wakil raja tidak begitu disukai oleh kalangan bangsawan dan para ulama kerajaan, mereka menganggap Pangeran Aria Jepara sudah terpengaruhi oleh pertentangan kepentingan raja di Jawa Tengah, yang sedang mengalami pergeseran kekuasaan dengan tampilnya panembahan Senopati sebagai penguasa di Mataram. Para bangsawan Banten menghendaki bebasnya pengaruh dari Jawa Tengah terhadap Banten dan Jayakarta.⁴¹

Maulana Muhammad wafat pada tahun 1596 dan digantikan oleh Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir yang masih kecil dan pemerintahan di serahkan kepada wakilnya yaitu Pangeran

tidak jauh dari Banten. Lihat Isman Pratama Nasution, *Kedudukan dan Peranan Tokoh Agama Dalam Birokrasi Kerajaan Islam Banten Abad 16-18*. (Depok: UI Press, 1993), 12.

⁴⁰Lihat Graaf and Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama Di Jawa*. (Jakarta: Grafitifers, 1986).

⁴¹ Sehingga mereka sepakat menggeser Pangeran Aria Jepara sebagai raja pengganti, dan membentuk dewan perwakilan yang terdiri dari qadi dan para bangsawan, dan tepatnya pada tahun 1596, berdasarkan catatan yang didapat dari pedagang Belanda, berkat tindakan tegas tersebut, Maulana Muhammad diakui sebagai raja oleh para pembesar kerajaan, dan selama ia masih di bawah umur, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh kadhi bersama empat pembesar lainnya. Lihat Claude Guillot, *The Sultante of Banten*. (Jakarta: Gramedia Book Publishing Division, 1990).

Mangkubumi Aria Ranamanggala sampai Sultan dewasa, dan masa Sultan Abul Mafakhir Mahmud Kadir adalah masa pemerintahan paling lama dalam sejarah Banten yakni tahun 1596-1651. Dan Sultan Abdul Kadir merupakan salah satu sultan yang memimpin pada abad 17.⁴² Di bawah ini akan dipaparkan perodesasi Sultan Banten yang berkuasa sekitar abad XVII:

1. Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir

Abul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir diangkat sebagai Sultan Banten (1596-1651), setelah ia sudah cukup dewasa. Sultan yang baru ini dikenal sebagai orang yang arif bijaksana dan banyak memperhatikan kepentingan rakyat. Bidang pertanian, pelayaran dan kesehatan rakyat mendapat perhatian utama dari Sultan Banten ini. Ia berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama dengan Negara Islam. Kemudian Sultan Abul Mafakhir penguasa Banten pertama yang mendapat gelar Sultan dari penguasa Arab di Mekah (1636).⁴³

Menurut Azyumardi Azra, pada tahun 1636 penguasa Banten di Jawa Barat, Abdul Kadir, mendapat gelar Sultan dari Syarif Makkah sebagai hasil misi khusus yang dikirimkannya ke Tanah suci. Sultan Banten ini juga menerima “bendera dan pakaian suci dan apa yang dipercayai sebagai bekas Nabi” dari penguasa *Haramayn*. Semua pemberian Syarif Makkah ini diarak dalam prosesi keliling kota Banten pada kesempatan peringatan Maulid Nabi. Selanjutnya pertukaran surat menyurat dan hadiah di antara istana Banten dengan penguasa *Haramyan* terus berlangsung sampai menjelang akhir abad ke-17.⁴⁴

Pada masa Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir ini dibantu oleh ulama dalam menjalankan pemerintahannya

⁴²Isman Pratama Nasution, *Kedudukan dan Peranan Tokoh Agama Dalam Birokrasi Kerajaan Islam Banten Abad 16-18*. (Depok: UI Press, 1993), 12.

⁴³Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 200), 44.

⁴⁴Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. (Bandung : Mizan, 1994), 56.

sebagaimana yang dilakukan oleh Sultan-sultan sebelumnya juga, ulama yang membantu pemerintahan Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir yaitu Entol kawista sebagai qadi di Kesultanan Banten. Sebagaimana yang banyak disebutkan dalam sumber lokal mengenai peranan Entol dalam menjalankan birokrasi penegakan hukum di Kesultanan Banten pada abad XVII khususnya di masa pemerintahan Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir.

Bahkan berdasarkan sumber wawancara dari salah satu keturunan Sultan Banten mengatakan dalam setiap kepemimpinan di Kesultanan Banten dari dahulu selalu didampingi oleh 40 ulama sebagai penasihat dalam menjalankan roda pemerintahan, dari 40 ulama tersebut sebagai pemimpin ialah qadi. Tugas dari 40 ulama itu bukan hanya penasihat tapi juga membuat fatwa mengenai hukum Islam yang kemudian difatwakan ke seluruh wilayah Kesultanan Banten.⁴⁵

Selain itu, sultan Abul Mafakhir bersikap tegas terhadap siapapun yang mau memaksakan kehendaknya kepada Banten. Misalnya ia menolak mentah-mentah kemauan VOC yang hendak memaksakan monopoli perdagangan di Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Abul Mafakhir, Kesultanan Banten tidak luput dari ancaman Mataram. Palembang menjadi titik pertemuan dimana kedua kekuasaan itu berbenturan. Setelah serangan pada tahun 1598 dan 1606, ada rencana penyerangan Banten pada tahun 1638.⁴⁶ Kemudian Palembang beraliansi dengan Mataram pada tahun 1626.

⁴⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Fathul Adzim Khotib, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Muhtajin sekaligus Pengurus Kenadziran Kesultanan Banten, Senin 29 Januari 2018, di Kawasan Banten Lama, Serang-Banten

⁴⁶ Akibat ekspansi Mataram ke arah Timur yang berhasil menaklukkan Madura (1624), banyak yang mencari pengungsian ke Banten, diantaranya Bupati Sumenep. Bersama dengan beberapa pemuka tokoh lainnya yang diserahkan kepada mataram yang menuntut agar ia diekstradisi. Kemudian Banten setengah terlindungi dari agresi Mataram setelah ada benteng dan loji VOC didirikan di Jakarta pada tahun 1619. Untuk menghadapi serangan Banten yang beberapa kali menemui kegagalan. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru:*

Para pedagang Belanda dan juga Inggris membeli rempah-rempah dari Lisbon (Portugal). Rempah-rempah itu dibawa dari dunia Timur oleh para pedagang Portugis. Ketika terjadi Perang agama Spanyol yang Katholik dan Belanda yang Protestan, perdagangan Belanda menjadi terganggu, terlebih setelah Spanyol juga menduduki Portugis pada tahun 1580. Untuk mengatasi keadaan ini, pada tanggal 2 April 1595 sebuah perusahaan dagang yang bernama *Compagnie van Verre* membiayai sebuah ekspedisi pertama para pedagang Belanda ke Nusantara. Tugas utamanya adalah mencari rempah-rempah dan membawa komoditas perdagangan tersebut ke negerinya. Ekspedisi ini berkekuatan empat buah kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, seorang pedagang yang pernah tinggal beberapa tahun di Lisbon, dan Pieter de Keyser sebagai pimpinan navigasi. Setelah pelayaran yang berat melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, akhirnya mereka mendarat di Banten pertama kali pada tanggal 23 Juni 1596.⁴⁷

Kedatangan orang-orang Belanda disambut dengan ramah oleh penduduk setempat. Namun orang-orang asing ini bertindak arogan, angkuh dan kasar. Kedatangan orang Belanda ke Banten bertepatan dengan rencana penyerangan Banten ke Palembang. Sepulang dari Palembang orang-orang Banten masih mendapati orang-orang asing ini di Banten, sebab mereka bermaksud menunggu panen lada agar bisa dibeli murah. Mendengar hal ini Mangkubumi Jayanegara Marah.⁴⁸

1500-1900; Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid-1. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

⁴⁷ Husein Djadjadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sedjarah Banten.* (Jakarta: Djambatan, 1983), 171-172.

⁴⁸ Terlebih ketika pada suatu malam, orang-orang Belanda ini merampok dua buah kapal penuh lada dari Jawa kemudian mereka lari keluar pelabuhan Banten sambil menembaki kota Banten. Beberapa orang pasukan Banten berhasil menyerbu ke kapal Belanda dan menangkap Cornelis de Houtman. Setelah ditahan hampir sebulan, dengan tebusan sebesar 45.000 gulden ia dilepas dan diusir dari Banten pada tanggal 2 Oktober 1596. Lihat Halwany Michrob, dan Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten.* (Serang: Penerbit Sodara, 1993).

Setelah kejadian itu, rombongan kedua datang lagi di Banten tepatnya pada tanggal 28 November 1598 di bawah pimpinan Jacob van Neck dibantu van Waerwijk dan van Heemskerck. Belajar dari pengalaman pertama yang dilakukan oleh orang Belanda, rombongan kedua mencoba mengubah sikap. Mereka berusaha untuk pandai-pandai membawa diri bahkan mereka pun menghadap Sultan dengan membawa hadiah sebagai tanda persahabatan. Hasil dari perubahan sikap tersebut, akhirnya mereka berhasil membawa tiga kapal penuh lada ke negerinya, sementara lima kapal lainnya menuju Maluku. Ternyata keberhasilan mereka mengundang para pedagang lainnya untuk datang ke Nusantara. Sepanjang waktu tahun 1598, ada sekitar 22 kapal yang berlayar ke Nusantara, bahkan tahun 1602 tercatat 65 buah kapal yang mendarat di Nusantara.⁴⁹

Persaingan tidak sehat yang terjadi diantara sesama pedagang ternyata menimbulkan kerugian yang besar. Untuk mengatasi ini, maka pada tahun 1602 didirikanlah *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Badan ini selain untuk melindungi para pedagang Belanda juga menghadapi persaingan dengan para pedagang Inggris yang tergabung dalam *East India Company* (EIC). VOC mempunyai hak-hak khusus seperti monopoli untuk berdagang di wilayah antara Amerika dan Afrika, membentuk angkatan perang sendiri, mengadakan peperangan, mendirikan benteng, bahkan menjajah.⁵⁰

⁴⁹ Husein Djadjadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sedjarah Banten*. (Jakarta: Djambatan, 1983), 169-179.

⁵⁰VOC juga berhak mengangkat pegawai sendiri dan mempunyai mata uang sendiri, sedangkan kewajiban VOC adalah bertanggung jawab kepada *Staten General*, dan pada waktu perang harus membantu pemerintah dengan uang dan angkatan perang. VOC membuka kantor cabangnya di beberapa tempat di negeri Belanda dan Banten pada tahun 1603 di bawah pimpinan Francois Wittert, oleh karena sikap tegas Mangkubumi Banten, maka kantor pusat VOC di Hindia Timur dipindahkan ke Jayakarta pada tahun 1611. Lihat Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta : LP3ES, 2004).

Jayakarta kemudian berubah nama oleh Jan Pieterszon Coen dengan nama Batavia.

Sikap yang tidak nyaman masyarakat Banten membuat konflik antara Banten dengan Belanda semakin tajam, setelah VOC memperoleh tempat kedudukan di Batavia. Persaingan dagang dengan Banten tidak pernah berkesudahan. VOC melakukan siasat blokade terhadap pelabuhan niaga Banten, melarang dan mencegat *Jung-jung* dari Cina dan perahu-perahu dari Maluku yang akan berdagang ke pelabuhan Banten. Hal ini membuat pelabuhan Banten hampir lumpuh. Dalam bulan Desember 1633 pecalah perang antara Banten dan VOC. Orang-orang Banten beroperasi di laut sebagai bajak laut dan di daratan sebagai perampok pula, sehingga memprovokasi VOC untuk melakukan ekspedisi ke Tanam, Anyer dan Lampung. Kota Banten sendiri berkali-kali diblokade. Situasi perang ini berlaku terus selama enam tahun.⁵¹ Dan itu terus berlanjut kepada Sultan selanjutnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Sultan Abul Fath Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa)

Pada pertengahan abad ke-17 Masehi, tanggal 10 Maret 1651, Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir meninggal dunia, jenazahnya dikuburkan di Kenari, berdekatan dengan ibundanya dan putra kesayangannya, Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang wafat pada tahun 1650.⁵² Sebagai pengganti Sultan Abdul Kadir yang mangkat,

⁵¹ Peletakan senjata dilakukan pada tahun 1636, akan tetapi perjanjian perdamaian baru ditandatangani pada tahun 1639. Dan hubungan dalam dua dasawarsa berikutnya tetap tegang. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900; Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid-1*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

⁵² Perkawinan Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir dengan Ratu Martakusuma (putri Pangeran Jayakarta), Sultan Abdul Kadir mempunyai enam anak yaitu Ratu Kulon (Ratu Pembayun), Pangeran Surya, Pangeran Arya Kulon, Pangeran Lor, dan Pangeran Raja. Sementara dari istrinya yang lain, Ratu Aminah (Ratu Wetan), Sultan mempunyai beberapa anak yaitu Pangeran Wetan, Pangeran Kidul, Ratu Inten, dan Ratu Tinumpak. Masih ada lagi dari beberapa anak dari istri yang lain.

maka diangkatlah Pangeran Adipati Anom Pangeran Surya, putra dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad, menjadi Sultan Banten yang ke-5 pada tanggal 10 Maret 1651.

Sultan ini dikenal sebagai *Pangeran Ratu Ing Banten* atau Sultan Abu Fath Abdul Fatah Muhammad Syifa Zainal Arifin. Sultan yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682), seorang yang ahli dalam strategi perang yang dapat diandalkan. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga menaruh perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan agama Islam. Untuk membina mental para prajurit Banten, ia mendatangkan guru-guru agama dari Arab, Aceh dan daerah lainnya. Salah seorang guru agama tersebut ialah Ulama besar dari Makassar, yaitu Syeikh Yusuf, yang dikenal dalam tradisi masyarakat Makassar sebagai *Tuanta Salamaka* atau *Syeikh Yusuf Taju'l Khalwati*. Ia kemudian dijadikan mufti agung, guru dan menantu Sultan Ageng Tirtayasa.⁵³

Tahun pertama dalam pemerintahannya, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengembangkan dan membawa kejayaan kembali perdagangan Banten hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa Banten berhasil menarik perdagangan bangsa Eropa dan lainnya untuk berdagang di Indonesia, diantaranya Inggris, Prancis, Denmark dan Portugis. Sebagai saingan VOC, Banten lebih dekat dengan para pedagang Eropa, itu karena masih menjalankan perdagangan bebas bukan sistem perdagangan monopoli seperti yang dijalankan VOC Belanda. Selain itu, Banten mampu mengembangkan perdagangannya dengan Persia, Surat, Mekkah, Koromandel, Benggala, Syiam, dan Cina.⁵⁴

Selain mengembangkan perdagangan dalam pemerintahannya, Sultan Ageng Tirtayasa berupaya juga untuk

Lihat Halwany Michrob, dan Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten*. (Serang: Penerbit Sodara, 1993).

⁵³Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 2004), 47.

⁵⁴Schingga VOC menganggap keadaan ini sebagai ancaman serius terhadap perdagangannya yang berbasis di Btavia. Lihat Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 2004).

memperluas pengaruh dan kekuasaan ke wilayah Periang, Cirebon dan sekitar Batavia, guna mencegah perluasan wilayah kekuasaan Mataram yang telah masuk sejak awal abad le-17. Selain itu juga untuk mencegah pemaksaan monopoli perdagangan VOC yang tujuan akhirnya adalah penguasaan secara politik terhadap Banten. Sultan Ageng Tirtayasa meneruskan usaha kakeknya untuk mengirimkan tentara Banten dalam mengadakan gangguan terhadap Batavia, pusat politik VOC Belanda, karena VOC terus menerus melakukan rongrongan politik kolonialnya.⁵⁵

Meskipun VOC tetap memaksakan kehendaknya untuk memonopoli keadaan di Banten. Keingina Belanda tetap tidak kesampaian, karena Banten selalu berjuang dengan gigih untuk memulihkan kedudukannya, bahkan pada tahun 1655 dua kapal Belanda dirusak oleh pasukan Banten. Dengan demikian beberapa kebun tebu di daerah Angke Tangerang milik Belanda dirusak sehingga VOC terpaksa menutup kantor dagangnya. Tahun-tahun berikutnya, Banten dapat meningkatkan ekonominya dengan adanya loji-loji Prancis di Bandar Banten. Untuk sementara aktivitas perdagangan dan komunikasi Banten dengan pihak lain dibiarkan berjalan karena Belanda harus menghadapi perang melawan Mataram.⁵⁶

Banten terus melakukan upaya perlawanan terhadap Belanda di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, perang pecah lagi pada tahun 1656. Dua kapal Belanda disita dan perampokan di Batavia dan sekitarnya semakin menghebat. Belanda langsung mengirim empat sampai lima kapal dan mengadakan blokade terhadap Banten. Dengan demikian aktivitas perdagangan di pelabuhan Banten sangat

⁵⁵Pada tahun 1655, VOC telah mengusulkan kepada Sultan Banten agar melakukan pembaharuan perjanjian yang sudah hampir 10 tahun dibuat oleh kakeknya pada tahun 1645. Akan tetapi, pihak Banten merasa tidak perlu memperbaruinya selama pihak kompeni ingin menang sendiri. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru (1500-1900): Dari Emporium Sampai Imperium*. (Jakarta: Gramedia, 1888).

⁵⁶Wangania, *Teknologi pada Masa Kesultanan Banten 1527-1813, dalam Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), 44.

terganggu dan nyaris terhenti. Karena itu Sultan Ageng Tirtayasa segera hendak berdamai dengan VOC, perundingan pada akhir tahun 1657 gagal karena tuntutan untuk pelayaran bebas ke kepulauan rempah-rempah ditolak oleh VOC.⁵⁷

Meskipun Sultan Ageng Tirtayasa disibukkan dengan urusan konflik dengan VOC, Sultan tetap melakukan upaya-upaya pembangunan dengan membuat saluran air dari sungai Untung Jawa hingga ke Pontang. Saluran yang mulai digali tahun 1660 ini dimaksudkan untuk kepentingan irigasi dan memudahkan transportasi dalam peperangan. Upaya itu pula meningkatkan produksi pertanian yang erat hubungannya dengan kesejahteraan rakyat serta untuk kepentingan logistik jika menghadapi peperangan. Karena Sultan banyak mengusahakan pengairan dengan melaksanakan penggalian sungai-sungai dengan menghubungkan sungai-sungai yang membentang sepanjang pesisir utara, maka atas jasa-jasanya ia digelar Sultan Ageng Tirtayasa.⁵⁸

Sultan Ageng Tirtayasa melakukan usaha baik dalam bidang politik diplomasi maupun bidang pelayaran dan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain semakin ditingkatkan. Pelabuhan Banten makin ramai dikunjungi para pedagang asing dari Persia (Iran), India, Arab, Cina, Jepang, Filipina, Malayu, Pegu dan lainnya. Demikian pula dengan bangsa-bangsa dari Eropa yang bersahabat dengan Inggris, dalam hubungan persahabatan dan perdagangan dengan Inggris pada tanggal 10 November 1681 dengan menggunakan kapal Inggris,

⁵⁷Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900; Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid-1*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), 114-115.

⁵⁸ Sultan Ageng Tirtayasa juga melakukan konsolidasi pemerintahannya dengan mengadakan hubungan persahabatan antara lain dengan Lampung, Bengkulu, dan Cirebon. Hubungan pelayaran dan perdagangan dengan kerajaan Goa, dengan sumber rempah-rempah di Maluku, meskipun menurut perjanjian dengan VOC tidak diperbolehkan tetapi masih dilakukan. Lihat Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta : LP3ES, 2004).

dikirimkan utusan Sultan ke negeri Inggris terutama di bawah pimpinan Jaya Sadana, kemudian Prancis, Denmark dan Turki.⁵⁹

Sultan Ageng Tirtayasa telah membawa Banten kepada puncak kemegahannya. Disamping berhasil memajukan pertanian dengan sistem irigasi, ia pun berhasil menyusun kekuatan angkatan perangnya, memperluas hubungan diplomatik, dan meningkatkan volume perniagaan Banten, sehingga Banten menempatkan diri secara aktif dalam dunia perdagangan internasional. Sementara itu, armada Belanda yang berpangkalan di Batavia beberapa kali melakukan blokade terhadap pelabuhan Banten untuk memaksakan kehendaknya guna menjalankan monopoli perdagangan, seperti terjadi tahun 1655 dan 1657.

Bahkan tahun berikutnya 1658, terjadi bentrokan senjata sekitar satu tahun antara pasukan Banten dan VOC di daerah Angke, Tangerang, dan di perairan Banten. Selain itu, hubungan Banten dengan Mataram pun sering diwarnai oleh ketegangan, akibat besarnya keinginan Mataram untuk berkuasa atas seluruh Pulau Jawa dan menjadikan Banten di bawah kekuasaannya misalnya pada tahun 1628 dan 1649.⁶⁰ Banten telah mencium penetrasi Mataram, menghadapi keadaan itu Banten harus meningkatkan kekuatan militernya dan berkali-kali mengirimkan pasukan ke daerah perbatasan dengan Batavia dan Mataram.

Banten menjadi salah satu kunci jalur perdagangan dunia melalui Lautan Hindia, hingga memutari Afrika sampai ke

⁵⁹Pada tahun 1671 sebelum mengirimkan utusan ke Inggris, Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan puteranya, Sultan Abdul Kahar, ke Mekah sambil melaksanakan ibadah haji, dan ke Turki, karena kunjungannya ke Mekah dan ke Turki maka Sultan Abdul Kahar kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Lihat Uka Tjandrasasmita, *Banten sebagai Pusat Kekuasaan dan Niaga Antarbangsa, dalam Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995).

⁶⁰Pada tahun 1649, karena mendapat ancaman halus dari Sultan Mataram, kemudian Cirebon mengirim armada untuk menyerang Banten, namun gagal. Dalam tradisi Banten peristiwa tersebut “Pagarage” atau Pacabonan”. Lihat, Husein Djadjadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten*. (Jakarta: Djambatan, 1983).

Mediterania maupun kawasan Eropa. Posisi Banten adalah bandar besar sebagaimana Genoa Italia yang memasok barang ke berbagai kawasan Eropa. Banten benar-benar menjadi bandar kelas dunia pada masanya. Untuk memahami cepatnya pertumbuhan ibukota yang mengerikan, perlu diingatkan sebagai indikasi saja, berhubungan tidak adanya data sezaman yang tepat, bahwa jumlah keseluruhan penduduk dari bagian Jawa di Banten tahun 1814 hanya berjumlah 231.000 jiwa. Banten sudah jelas terkenal sebagai salah satu pelabuhan besar di Nusantara. Karena tertarik oleh lada, pedagang-pedagang dari seluruh pantau Samudera Hindia dan Laut Cina datang ke Banten untuk memperdagangkan barang dagangan mereka.⁶¹

Puncak kejayaan Banten terjadi ketika pemerintahan dipegang oleh Sultan Ageng Tirtayasa atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan yang nama aslinya Abul Fath Abdul Fattah ini tidak hanya bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya saja, tetapi juga dengan jitu dan cerdas menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Banten mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dengan swasembada beras. Dan juga sikap Sultan Ageng Tirtayasa yang bersih dan tidak mau berkompromi dengan kekuatan asing, yang mengancam kedaulatan negerinya serta selalu mengutamakan kemakmuran rakyat dan kedaulatan negerinya dengan menyatukan semua potensi rakyat dan diarahkan untuk kemakmuran dan

⁶¹Kita masih teringat akan daftar yang mengesankan dari bangsa-bangsa yang dijumpai di kota ini tahun 1596 oleh orang Belanda yang terheran-heran dan merasa senang sekali ketika mereka melakukan pelayaran yang pertama kali ke Asia Tenggara: Persia, Gujarat, Malabar, Keling, Pegu, Melayu, China, Turki, Arab dan Abisinia, tak terhitung orang Portugis yang berdagang di kawasan ini sejak hampir delapan puluh tahun lamanya. Dalam daftar yang sudah panjang itu, perlu ditambahkan untuk paruh kedua abad ke-17 orang Inggris, Denmark, Prancis dan tentu saja Belanda. Lihat Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 128.

kejayaan negerinya ini tercatat dalam sejarah sebagai puncak dari masa kejayaan Banten.⁶²

Sultan Ageng Tirtayasa mengembangkan proyek-proyek besar bertujuan untuk penanaman bahan makanan, tetapi juga merupakan perwujudan kemauan pemerintah dalam menata kembali keseluruhan wilayah berbagai terusan irigasi yang baru saja digali itu juga merupakan jalan lalu lintas yang memungkinkan terbentuknya di pantai utara dan penggabungan daerah-daerah secara langsung ke ekonomi Banten, karena terusan-terusan itu, menghubungkan ibukota dengan kota perbatasan Tangerang di tepi sungai Cisadane.⁶³

Catatan pertama yang diketahui mengenai tindakan yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa dalam bidang pertanian terdapat tahun 1659. Dijelaskan bahwa pada bulan September tahun itu, Kiyai Arya Mangunjaya, menteri Negara Sultan Ageng yang sangat giat dan setia, mengerahkan semua kepala wilayah kerajaan dan memerintahkan kepada mereka untuk mengumpulkan pohon kelapa muda sebanyak seratus batang setiap orang di daerah wewenangannya untuk ditanam demi kemaslahatan masyarakat Banten pada waktu itu.⁶⁴ Tumpuan yang diberikan oleh pemerintah pada proyek ini tidaklah dapat diragukan, dengan keputusan tambahan Sultan memerintahkan pemindahan dan pemukiman di perkebunan yang baru ini, sekitar dua puluh ribu orang yang dipindahkan dan ditempatkan di sepanjang Sungai Cisadane. Tidak dapat diragukan lagi bahwa pemindahan penduduk ini disertai pembangunan sedikitnya sepuluh desa, diketahui dari catatan abad ke-17 bahwa

⁶²Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Tanqihul Qaul al-Hatsiits*. (Serang: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, 2016).

⁶³Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 170.

⁶⁴Pohon-pohon itu harus ditanam di dekat Sungai Untung Jawa (Cisadane), artinya dekat perbatasan dengan Batavia, ini merupakan proyek yang luar biasa besarnya kalau dipikirkan bahwa seratus pohon kelapa memerlukan bidang tanah seluas sekitar satu hektar. Lihat Claude Guillot, *Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008).

desa di bagian barat Jawa pada zaman itu pada umumnya tidak mempunyai lebih dari lima ratus penduduk.⁶⁵

Pada bulan Oktober 1670, diambil keputusan untuk menggali terusan baru. Kali ini antara Pontang dan Tanara “mulai dari tepi laut sampai jauh ke daratan untuk merubah tanah-tanah yang terlantar. Sekitar tahun 1675-1677 proyek-proyek pengairan besar memperbanyak lagi tepatnya pada akhir tahun 1675. Untuk bulan November saja pada tahun itu tidak kurang dari empat proyek yang dilakukan bersamaan, walaupun besarnya proyek-proyek itu beragam. Diketahui bahwa pada bulan November 1675 “seluruh penduduk Banten” ikut serta dalam pembangunan bendungan di Sungai Pontang, Sungai Ciujung, untuk membelokkan air ke arah “terusan Tirtayasa yang baru saja dibangun” dan untuk mengairi sawah-sawah sepanjang lima sampai 6 *miljen* di setiap tepi terusan.⁶⁶ Pada waktu yang sama, sultan memerintahkan penggalian semua terusan yang panjangnya sekitar 3 km di daerah Tirtayasa dekat Tanara. Sebagaimana akan dapat dilihat, ia memerintahkan pembangunan sebuah istana dank arena seringnya tinggal di Istana itu, kemudian ia dikenal sampai sekarang dengan sebutan sultan Ageng Tirtayasa. Sekitar enam bulan kemudian, raja memerintahkan

⁶⁵Pada tahun 1663-1664, proyek ini dilaksanakan empat tahun kemudian tepatnya pada tahun 1663. Sumber mencatat bahwa sultan Ageng berkeinginan untuk memulai penggalian terusan pada akhir bulan puasa yang jatuh pada tanggal 27 April 1663. Terusan ini menghubungkan Sungai Tanara ke Sungai Pasilian, yang juga dinamakan Cimanceuri, melalui Balaraja, sepanjang tiga *mijlen*, yakni antara lima hingga enam kilometer. Pejabat Belanda memberitahukan bahwa tidak ada gunanya terusan itu dilanjutkan sampai ke Sungai Cusadane, karena terdapat ngarai (*kloof*) yang menghubungkan Sungai Pasilian dan Sungai Cisdanc. Terusan itu akan dapat memungkinkan penduduk-penduduk desa di daerah ini untuk mengangkut padi mereka dan hasil bumi lainnya dengan lebih mudah ke Tanara, kemudian dari sana ke Banten. Lihat Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 157.

⁶⁶Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 166.

penggalian sebuah terusan lagi di dekat Tirtayasa yang panjangnya kira-kira 2 km, dalamnya lebih dari 3 meter dan lebarnya sekitar 8 meter.⁶⁷

Banten mempunyai tiga pasar yang dibuka setiap hari, yang *pertama* dan terbesar terletak di sebelah timur kota (Karangantu). Di sana banyak ditemukan pedagang-pedagang asing dari Portugis, Arab, Turki, Cina, Qulon (India), Pegu (Birma), Melayu, Benggala, Gujarat, Malabar, Abesinia, dan dari seluruh Nusantara. Mereka berdagang sampai pukul sembilan pagi. Pasar *kedua* terletak di alun-alun dekat Masjid Agung, yang dibuka sampai tengah hari bahkan masih sore. Di pasar ini diperdagangkan merica, buah-buahan, senjata keris, tombak, pisau, meriam kecil, kayu cendana, tekstil, kain putih untuk bahan batik, bintang peliharaan, kambing dan sayuran. Demikian besarnya pasar kedua ini sehingga ujungnya hampir menyambung dengan pasar pertama dipelabuhan. Pasar *ketiga* terletak di daerah Pecinan yang dibuka setiap hari sampai malam.⁶⁸

Kesultanan Banten selama kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Banten membuka pintu kepada siapa pun yang mau berhubungan baik dan kerja sama dengan Banten. Kesultanan Banten aktif membina hubungan baik dan kerja sama dengan berbagai pihak di sekitarnya atau di tempat yang jauh sekalipun, antara lain dengan Makassar, Bangka, Cirebon dan Indrapura. Hubungan Banten dengan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara pada umumnya berlangsung dengan sangat baik. Demikian pula dengan Cirebon. Sejak awal telah terjadi hubungan erat dengan Cirebon melalui pertalian keluarga Keraton yang notabenenya adalah keturunan Sultan Syarif Hidayatullah, dan

⁶⁷Dari dua pertiga penduduk laki-laki ibu kota harus ikut serta dalam proyek ini, dan sepertiga sisanya dilarang meninggalkan kota untuk alasan keamanan. Lihat, Claude Guillot, Banten: *Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008).

⁶⁸Edi S. Ekadjati, *Wawacan Sejarah Galuh*. (Bandung: BEFEO, 1977), 97.

kerja sama bidang keagamaan, militer dan diplomatik.⁶⁹ Walaupun begitu, hubungan Banten dan Cirebon pernah diwarnai oleh suasana lain yang kurang baik, contohnya jika terjadi konflik antara Banten dan Cirebon, Cirebon selalu bersikap netral, sekali waktu Banten dan sekali lain Mataram mendesak Cirebon agar memihak kepada mereka.

Setelah Banten membebaskan dan mengembalikan Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya dari tahanan Mataram dan tahanan tentara Trunojoyo serta mengembalikan mereka ke Cirebon, bahkan mengangkat mereka menjadi Sultan di Cirebon, maka sejak tahun 1676 kekuasaan Banten “masuk” ke dalam Keraton Cirebon. Hal ini berlangsung sampai tahun 1681, ketika Cirebon berhasil menjalin hubungan dan kerja sama dengan VOC. Puncak konflik antara Banten dengan VOC terjadi setelah Amangkurat II menandatangani perjanjian dengan VOC yang sangat merugikan Mataram. Sultan Ageng Tirtayasa segera berhubungan dengan Sultan Mataram dan mendesak Mataram agar tidak mendekati VOC. Akan tetapi Amangkurat II sudah terlanjur terjerat oleh VOC, sehingga Sultan Ageng Tirtayasa tidak berhasil memutuskan hubungan Amangkurat II dan VOC. Selanjutnya ia membangkitkan perlawanan terhadap VOC di Cirebon, tetapi pemberontakan Cirebon dapat pula digagalkan oleh Belanda. Setelah pemberontakan Trunojoyo dapat dipadamkan, Sultan Ageng Tirtayasa harus berhadapan dengan VOC.⁷⁰

Bersamaan dengan itu, Banten mengalami perpecahan dari dalam, putera mahkota Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nasr

⁶⁹ Dalam hal ini Cirebon telah membantu Banten dengan mengirimkan pasukan militer dalam upaya menduduki ibu kota Kerajaan Sunda. Sebaliknya Banten membantu Cirebon dalam membebaskan dua putera Panembahan Girilaya, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya, yang ditahan di ibu kota Mataram dan kemudian ketika ditahan pasukan Trunojoyo di Kediri tahun 1677. Lihat Edi S. Ekadjati, *Wawacan Sejarah Galuh*. (Bandung : EEFE0, 1977).

⁷⁰ Wangania, *Teknologi pada Masa Kesultanan Banten 1527-1813, dalam Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), 44.

Abdul Kahar, yang dikenal dengan Sultan Haji diangkat menjadi pembantu ayahnya mengurus urusan dalam negeri, sedangkan urusan luar negeri dipegang oleh ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa dan dibantu oleh putera mahkota lainnya Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan ini tercium oleh perwakilan Belanda di Banten, W. Caeff yang kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji. Karena termakan dan terpengaruhi hasutan VOC. Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya, dan khawatir Sultan Haji tidak akan naik tahta Kesultanan Banten, karena masih ada putera Sultan Ageng Tirtayasa yang lainnya yaitu Pangeran Arya Purbaya. Kekhawatiran ini akhirnya menimbulkan persekongkolan Sultan Haji dengan VOC untuk merebut tahta kekuasaan Banten, terutama setelah Sultan Ageng Tirtayasa banyak tinggal di Keraton Tirtayasa.⁷¹

Perjanjian ini diterima oleh Sultan Haji. Dengan bantuan pasukan VOC Belanda, pada tahun 1681 Sultan Haji melakukan kudeta kepada ayahnya dan berhasil menguasai Istana Surosowan yang kemudian berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada tanggal 27 Februari 1682, pecah perang antara ayah dan anak, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa menyerang Belanda untuk mengepung Sultan Haji yang menduduki Istana Surosowan. Dalam waktu singkat, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat menguasai kembali Istana Surosowan. Sultan Haji segera dilindungi oleh Jacob de Roy dan dibawa ke loji milik VOC.⁷²

⁷¹Hasil persengkokolan tersebut terjadi sebuah perjanjian antara Sultan Haji dan VOC, dalam perjanjian tersebut VOC bersedia membantu Sultan Haji dengan empat syarat yaitu pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC, kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan Persia, Cina, dan India, ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji, dan keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali ke Banten. Lihat Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 2004).

⁷²Claude Guillot, Banten: *Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 38.

Di bawah pimpinan Kapten Sloot dan W. Caeff, pasukan Haji dan VOC bersama-sama mempertahankan loji itu dari kepungan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa. Akibat perlawanan yang sangat kuat dari pasukan Sultan Ageng Tirtayasa, bantuan militer yang dikirim dari Batavia tidak dapat mendarat di Banten. Kemudian bantuan militer yang lebih besar segera dikirim dari Batavia dengan syarat Sultan Haji memberikan hak monopoli kepada VOC di Banten. Sultan Haji menyetujui syarat itu, pada tanggal 7 April 1682 bantuan kompeni yang dijanjikan itu datang dengan kekuatan besar membalas kekuatan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dengan melakukan penyerangan ke Keraton Surosowan dan Benteng Istana Tirtayasa di bawah pimpinan Francois Tack dan De Saint Martin, serta dibantu oleh Jonker tokoh yang membantu memadamkan pemberontakan Trunojoyo. Pasukan ini berhasil membebaskan loji dari kepungan Sultan Ageng Tirtayasa.⁷³

Meskipun demikian Sultan Ageng Tirtayasa terus melakukan perlawanan hebat. Sultan Ageng Tirtayasa dengan gigih meneruskan perjuangannya, dibantu oleh pasukan Makassar, Bali dan Melayu. Markas besar pasukannya ada di Margasana. Di sinilah Pangeran Aria Suriadiwangsa ber-sama 600 sampai dengan 800 prajurit bertahan. Pangeran Yogya bersama 400 orang pasukan berada di Kenari, Kiyai Arya Jungpati dengan 120 orang pasukan berada di Kartasana. Di Serang tersedia pasukan sebesar 400 orang. Di Jambangan 400 sampai dengan 500 orang, di Tirtayasa 500 orang, dan di Bojonglopong 100 orang. Serangan pasukan Kompeni di bawah pimpinan Jonker St. Martin dan Tack berhasil mendesak barisan Banten. Margasana pun dapat diduduki. Kacarabuan dan Tangerang juga dapat dikuasai oleh Kompeni. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian mengundurkan diri ke Tirtayasa yang dijadikan pusat pertahanannya. Tanara dan Pontang diperkuat pertahanannya. Di Kademangan ada pasukan sekitar 1.200 orang, dibawah pimpinan Arya Wangsadiraja. Mereka cukup lama dapat bertahan, tetapi pada

⁷³Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900; Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid-1*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 206.

tanggal 2 Desember 1682, Kademangan akhirnya jatuh juga setelah terjadi pertempuran sengit dengan VOC. Dalam serangkaian pertempuran ini dikedua belah pihak banyak yang gugur.⁷⁴

Pihak Kompeni berusaha beberapa kali untuk mencari Sultan Ageng Tirtayasa dan membujuknya untuk menghentikan perlawanan dan turun ke Banten. Sultan Haji mengutus 52 orang keluarganya untuk menjemput ayahnya, sebagai tipu daya untuk menangkap ayahnya, di Ketos, dan pada malam menjelang tanggal 14 Maret 1683 iring-iringan Sultan Ageng Tirtayasa memasuki Istana Surosowan. Tibanya Sultan Ageng Tirtayasa di Istana Surosowan telah mengakhiri perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Kompeni, karena kemudian ia ditangkap pada tanggal 14 Maret 1683, akibat pengkhianatan puteranya sendiri yang bekerja sama dengan Belanda.⁷⁵

Ketika Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap Kompeni, para pengikut setia yang dipimpin oleh Pangeran Purbaya, Pangeran Kulon, dan Syeikh Yusuf, meneruskan perjuangan melawan Kompeni. Syeikh Yusuf yang berasal dari Makassar, diangkat

⁷⁴Sebagian pasukan Banten mengungsi ke Ciapus, Pagutan dan Jasinga. Dengan jatuhnya pertahanan Kademangan, tinggal Tirtayasa menjadi bulan-bulanan Kompeni. Serangan umum dimulai dari daerah pantai menuju Tanara dan Tangkurak. Pada tanggal 28 Desember 1682 pasukan Jonker, Tack dan Michielsz menyerang Pontang, Tanara dan Tirtayasa serta membakarnya. Ledakan-ledakan dan pembakaran hancurkan keratin Tirtayasa. Akan tetapi Sultan Ageng Tirtayasa berhasil menyelamatkan diri ke pedalaman. Pangeran Arya Purbaya juga berhasil lolos dengan selamat dengan terlebih dahulu membakar benteng dan keratonnya. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900; Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid-1*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

⁷⁵Namun Pangeran Arya Purbaya berhasil lolos. Sultan Ageng Tirtayasa dipenjarakan di Batavia. Atas permintaan keluarganya, khususnya cucu Sultan Agrng Tirtayasa yaitu Sultan Abdul Al Mahasin Zainul Abidin. Jenazah Sultan Ageng Tirtayasa dipulangkan dan dimakamkan di kompleks Masjid Agung Banten. Lihat Edi S. Ekadjati, *Kesultanan Banten dan Hubungannya dengan Wilayah Luar, dalam Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995).

sebagai mufti kerajaan. Syeikh Yusuf adalah sahabat dan juga menantu Sultan Ageng Tirtayasa yang telah dikenalnya sejak sebelum menjadi Sultan pada tahun 1664. Dalam usia 38 tahun, Syeikh Yusuf datang dari Mekah ke Banten. Ia bersedia untuk tinggal dan membantu Banten setelah mendengar bagaimana hebatnya Banten melawan Kompeni pada tahun 1659. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan kemudian Syeikh Yusuf dinikahkan dengan putri Sultan Ageng Tirtayasa.⁷⁶

Syeikh Yusuf bersama Pangeran Kidul dan pasukannya menuju Muncang terus ke Lawang Taji (Jasinga) menyusur Cidurian dengan tujuan Cirebon, Kompeni segera mengirim pasukan untuk mencegat Syeikh Yusuf. Ternyata usaha Syeikh Yusuf hanya trik saja. Tujuannya adalah ke Cikaniki terus ke Banten melalui Cisarua dan Jampang. Jumlah pasukan Syeikh Yusuf kurang lebih 5.000 orang termasuk 1.000 orang Makassar, Bugis dan Melayu yang siap mati bersama gurunya. Di Cikini Van Happel komandan pasukan Kompeni, mencoba mencegat pasukan Banten, tetapi tidak dapat mengejar karena Syeikh Yusuf bergerak di pegunungan.⁷⁷

Ketika berada di Jampang, Syeikh Yusuf terus menuju Pamotan dan terus ke Cilacap dengan menggunakan perahu. Di sana ia dicegat Kompeni, sehingga Syeikh Yusuf membelok dan terus ke Padaherang, kemudian pasukan Syeikh Yusuf melakukan penyerbuan ke Benteng Kompeni. Namun pada tanggal 25 September 1683, Kompeni melakukan serbuan besar-besaran ke Padaherang. Akibatnya Pangeran Kidul dan banyak pembesar Banten dan Makassar gugur. Istri dan putri Syeikh Yusuf ditawan oleh Kompeni. Sementara itu Syeikh Yusuf bersama pasukannya berhasil meloloskan diri ke daerah Banjar dan kemudian berpindah-

⁷⁶Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 2004), 54.

⁷⁷Van Happel kemudian kembali ke Batavia dengan menyebarkan hasutan kepada penduduk agar mencegat Syeikh Yusuf. Gubernur Jenderal telah menyediakan hadiah sebesar 1.000 ringgit bagi siapa saja yang bisa menangkap Syeikh Yusuf.

pindah tempat sambil menghantam Kompeni hingga akhirnya sampai di Mandala, di Sukapura.

Kompeni mengalami kesulitan untuk menangkap Syeikh Yusuf yang dikelilingi gerilyawannya yang siap mati membela guru mereka. Akhirnya Kompeni mengatur siasat untuk menangkap Syeikh Yusuf. Van Happel dengan berpakaian seperti orang Arab, pura-pura seperti tahanan Kompeni, berhasil menerobos pertahanan para gerilyawan. Ia masuk ke sebuah tempat yang bernama Karang dengan membawa anak perempuan Syeikh Yusuf yang bernama Asma yang telah ditangkap Kompeni. Kemudian Van Happel meminta maaf atas kedatangannya dengan cara seperti itu dan membujuk Syeikh Yusuf agar mau berunding dengan Kompeni dengan janji-janji manis. Putrinya yang sudah diajari Van Happel juga ikut membujuk ayahnya. Syeikh Yusuf akhirnya menerima permintaan itu. Dan pada tanggal 14 Desember 1683, Syeikh Yusuf berangkat ke Cirebon. Dari sana ia bersama anggota keluarganya dan 12 santri serta pasukannya dibawa ke Batavia dan dijebloskan ke penjara. Ia sudah tertipu oleh bujukan Kompeni yang licik. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1684, Syeikh Yusuf dibuang ke Ceylon. Ternyata dari Ceylon Syeikh Yusuf masih bisa mengadakan kontak dengan orang-orang Banten yang pulang menunaikan ibadah haji.⁷⁸

Dengan ditangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa dan Syeikh Yusuf serta pengikut-pengikut setianya, telah membawa Banten ke ambang penjajahan Kompeni. Peperangan sudah mulai berkurang, tapi rakyat di sana-sini masih mengadakan perlawanan walaupun mungkin tidak begitu berarti. Sementara itu, dengan restu Kompeni

⁷⁸ Akhirnya Syeikh Yusuf dipindahkan ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan hingga meninggal dunia di sana pada tanggal 23 Mei 1699. Kepahlawanan Syeikh Yusuf dikenang oleh masyarakat bukan hanya di Banten tetapi juga di Afrika Selatan. Meskipun meninggal di Afrika Selatan, makamnya ada di Gowa, Sulawesi Selatan dan sering diziarahi orang. Lihat Nabilah Lubis, *Syaikh Yusuf al-Taj al-Makassari, Menyingskap Intisari Segala Rahasia*. (Bandung: Mizan, 1996).

pula lah Sultan Haji dikukuhkan menjadi Sultan Banten (1682-1687).⁷⁹

3. Sultan Abu Nasr Abdul Kahar (Sultan Haji)

Setelah berakhir kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, ayah dari Sultan Haji, maka dengan demikian dikukuhkanlah Sultan Abu Nasr Abdul Kahar atau yang lebih dikenal oleh Kompeni sebagai Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang ke-6. Setelah menjadi Sultan Banten, Sultan Haji harus menerima konsekuensi hadapan Belanda dengan ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Haji dan Belanda, pada tanggal 17 April 1684 yang terdiri dari 10 pasal utama, terpaksa harus diterima oleh Sultan Haji. Adapun isi perjanjian yang ditandatangani di Keraton Surosowan dan dibuat dalam bahasa Belanda, Jawa dan Melayu itu isinya sebagai berikut:

1. Bahwa semua pasal serta ayat yang tercantum pada perjanjian 10 Juli 1659 mendapat pembaharuan, dan pasal yang masih dipercayai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak akan dipelihara baik-baik tanpa pembaharuan. Di samping itu kedua belah pihak menganggap sebagai kedua kerajaan yang bersahabat yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belahnya. Tambahan bahwa Sultan Banten tidak boleh memberikan bantuan apa pun kepada musuh-musuh VOC, baik berupa senjata, alat perang atau bahan perbekalan, demikian pula halnya kepada sahabat VOC dan terutama *sunan* atau *susuhunan* atau putera-putera mahkota Cirebon tidak boleh mencoba melakukan penyerangan atau permusuhan karena ketenangan dan perdamaian di Jawa bagaimanapun harus terlaksana.
2. Dan oleh karena penduduk kedua belah pihak harus ada ketenangan dan bebas dari segala macam pembunuhan dan

⁷⁹Dengan demikian kedaulatan Kesultanan Banten telah runtuh, apalagi dengan ditandatanganinya perjanjian pada tanggal 17 April 1684 yang terdiri dari 10 pasal utama yang terpaksa harus diterima dengan segala konsekuensinya, Lihat Uka Tjandrasmita, *Sultan Ageng Tirtayasa*. (Jakarta: Depdikbud, 1981).

perampokan yang dilakukan oleh orang-orang jahat di hutan-hutan dan pegunungan, maka orang Banten dilarang mendatangi daerah termasuk Jakarta baik di sungai-sungainya maupun di anak-anak sungainya. Sebaliknya juga bagi orang Jakarta tidak boleh mendatangi daerah dan sungai ataupun anak sungainya yang termasuk Banten. Kecuali kalau disebabkan keadaan darurat masing-masing diperbolehkan memasuki daerah tersebut tetapi dengan surat izin jalan yang sah, dan kalau tidak maka akan dianggap sebagai musuh yang dapat ditangkap atau dibunuh tanpa memutuskan perjanjian perdamaian itu.

3. Dan karena harus diketahui dengan pasti sejauh mana batas daerah kekuasaan yang sejak jaman lampau telah dimaklumi, maka tetap ditentukan daerah yang dibatasi oleh Sungai Untung Jawa (Cisadane) atau Tangerang dari pantai laut hingga pegunungan sejauh aliran sungai tersebut dengan kelokannya dan kemudian menurut garis lurus dari daerah selatan hingga utara sampai di lautan Selatan. Bahwa semua tanah di sepanjang Sungai Untung Jawa atau Tangerang akan menjadi milik atau ditempati VOC.
4. Dalam hal itu setiap kapal VOC atau kepunyaan warganya, begitu pula kepunyaan Sultan Banten dan warganya, jika terdampar atau mendapat kecelakaan di laut Jawa dan Sumatera, harus mendapat pertolongan baik penumpangnya atau pun barang-barangnya.
5. Bahwa atas kerugian, kerusakan yang terjadi sejak perjanjian tahun 1659 yang diakibatkan oleh Sultan dan Kesultanan Banten sebagaimana telah jelas dinyatakan pada tahun 1680 oleh utusan Banten dan demikian pula akibat pembunuhan dan perampokan oleh Pangeran Aria Surya di loji VOC sehingga ada pembunuhan kepala VOC Jan van Assendelt, dan segala kerugian-kerugian lainnya harus diganti oleh Sultan dengan uang sejumlah 12.000 ringgit kepada VOC.
6. Setelah perjanjian ditandatangani dan disahkan oleh kedua belah pihak maka baik tentara pengawal, pembunuh atau

pelanggar hukum VOC atau juga orang partikelir yang bersalah tanpa membedakan golongan atau kebangsaan dari sini atau dari tempat lainnya di daerah VOC, jika datang ke daerah Banten atau tempat lain yang ada di bawah daerah hukum VOC akan segera ditahan dan kemudian diserahkan kembali kepada perwakilan VOC.

7. Bahwa karena Banten tidak merupakan satu-satunya penguasa terhadap Cirebon maka harus dinyatakan bahwa kekuasaan raja-raja Cirebon dapat ditinjau kembali sebagai sahabat yang bersekutu di bawah perlindungan VOC yang juga di dalam ikatan perdamaian dan persahabatan ini telah dimengerti oleh kedua belah pihak.
8. Bahwa berkenaan dengan isi perjanjian tahun 1659 pasal empat dimana dinyatakan bahwa VOC tidak perlu memberikan sewa tanah atau rumah untuk loji, maka menyimpang dari hal itu VOC akan menentukan pembayaran kembali dengan cara debet.
9. Sultan berkewajiban untuk di waktu yang akan datang tidak mengadakan perjanjian atau persekutuan atau perserikatan dengan kekuatan atau bangsa lain karena bertentangan dengan isi perjanjian ini.
10. Karena perjanjian ini harus tetap terpelihara dan berlaku terus hingga masa yang akan datang, maka Paduka Sri Sultan Abdul Kahar Abu Nasr beserta keturunannya harus menerima seluruh pasal dalam perjanjian ini, dan dimaklumi, dianggap suci, dipercayai dan benar-benar akan dilaksanakan dan kemudian oleh segenap pembesar kerajaan tanpa penolakan sebagaimana pula dari pihak VOC yang diwakili oleh misi komandan dan Presiden Francois Tack, Kapten Herman Dirkse Wanderpoel, pedagang Evenhart van der Schuer, dan kapten bangsa Melayu Wan Abdul Bagus dari atas nama Gubernur

Jenderal VOC dan Dewan Hindia juga atas nama Dewan Jenderal VOC Belanda.⁸⁰

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dari pihak Banten diwakili oleh Sultan Abdul Kahar (Sultan Haji), Pangeran Dipaningrat, Kiyai Suko Tajuddin, Pangeran Natanagara, dan Pangeran Natawijaya, sementara dari pihak Belanda diwakili oleh Komandan dan Presiden Komisi Francois Tack, Kapten Herman Dirkse Wonderpoel, Evenhart van der Schuere, serta kapten bangsa Melayu Wan Abdul Bagus. Perjanjian itu sangat jelas meniadakan kedaulatan Banten karena dengan perjanjian itu segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dalam dan luar negeri harus atas persetujuan VOC. Dengan ditandatanganinya perjanjian itu, selangkah demi selangkah VOC mulai menguasai Kesultanan Banten dan sebagai simbol kekuasaannya.⁸¹

Penderitaan rakyat semakin berat bukan saja karena pembersihan atas pengikut Sultan Ageng Tirtayasa serta pajak yang tinggi karena Sultan harus membayar biaya perang, tetapi juga karena monopoli perdagangan VOC. Rakyat dipaksa untuk menjual hasil pertaniannya terutama lada dan cengkeh kepada VOC dengan

⁸⁰ Isi perjanjian yang paling berat ada dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa kerugian-kerugian dan kerusakan-kerusakan yang terjadi sejak tahun 1659 akibat tindakan Sultan Banten sehingga Kesultanan harus dibayar dengan uang sejumlah 12.000 ringgit. Demikian pula pasal 9, di mana Sultan Banten berkewajiban, untuk waktu yang akan datang, tidak akan mengadakan perjanjian atau persekutuan dengan kekuatan atau bangsa lainnya. Lihat Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 2004).

⁸¹ Pada tahun 1684-1685 VOC mendirikan sebuah benteng pertahanan di bekas benteng Kesultanan yang dihancurkan. Selain itu, didirikan pula benteng Speelwijk sebagai bentuk penghormatan kepada Speelman yang menjadi Gubernur Jenderal VOC dari tahun 1682 sampai dengan 1685. Demikian pula Banten sebagai pusat perniagaan antar bangsa menjadi tertutup karena tidak ada kebebasan melaksanakan politik perdagangan, kecuali atas izin VOC. Lihat Uka Tjandrasmita, *Banten sebagai Pusat Kekuasaan dan Niaga Antarbangsa, dalam Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995).

harga yang sangat rendah. Pedagang-pedagang bangsa Inggris, Perancis, dan Denmark diusir dari Banten dan pindah ke Bengkulu, kondisi demikian, sangatlah wajar kalau masa pemerintahan Sultan Haji banyak terjadi kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang yang ditimbulkan oleh rakyat. Selain menghadapi penentangan dari rakyatnya sendiri, Sultan Haji pun menghadapi suatu kenyataan bahwa VOC merupakan tuan yang harus dituruti segala kehendaknya. Karena tekanan-tekanan itu, akhirnya Sultan Haji jatuh sakit hingga meninggal dunia pada tahun 1687. Jenazahnya dimakamkan di sebelah Utara Masjid Agung Banten, sejajar dengan makam ayahnya. Sepeninggal Sultan Haji terjadilah perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya. Peninggalan itu dapat diselesaikan setelah Gubernur Jenderal VOC van Imhoff turun tangan dengan mengangkat anak pertama, Pangeran Ratu menjadi Sultan Banten dengan gelar Sultan Abu'l Fadhl Muhammad Yahya (1687-1690). Ternyata Sultan Abu'l Fadhl termasuk orang yang sangat membenci Belanda.⁸² Ia menata kembali Banten yang sudah porak poranda itu. Akan tetapi, baru berjalan tiga tahun, ia jatuh sakit dan tak lama kemudian mangkat, dan jenazahnya dimakamkan disamping kanan makam Sultan Maulana Hasanuddin di Pasarean Sabakingkin.⁸³ Kejadian-kejadian di atas mengakibatkan Kesultanan Banten di bawah aneksasi Kompeni Belanda dimulai dari Sultan Haji sampai pada kehancuran Kesultanan.

C. Struktur Pemerintahan Kesultanan Banten

Pembahasan dalam sub bab ini banyak menggunakan sumber karyanya Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII* dan beberapa sumber lainnya. Guna memahami sebaik-baiknya

⁸²Ditatanya kembali Banten yang sudah porak poranda itu. Akan tetapi baru berjalan tiga tahun, ia jatuh sakit yang mengakibatkan kematiannya. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Sabakingking sebelah Utara Masjid Agung Banten, sejajar dengan makam ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Lihat Muhammad Ismail, *Petunjuk Jalan dan Keterangan Bekas Kerajaan Kesultanan Banten*. (Serang: Saudara,1983), 7.

⁸³ Muhammad Ismail, *Petunjuk Jalan dan Keterangan Bekas Kerajaan Kesultanan Banten*. (Serang: Saudara,1983), 8.

arti sebenarnya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman itu perlu diingatkan secara garis besar mengenai susunan pemerintahan dan masyarakat di Kesultanan Banten.

Sajarah Banten menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati dan putranya, Hasanudin meninggalkan Demak menuju Pelabuhan Banten pergi ke kota Banten Girang, yang merupakan pusat pemerintahan daerah tersebut. Kemudian mereka mengunjungi Gunung Pulasari yang terletak di pedalaman. Hasanudin lama tinggal di daerah ini, berada di tengah-tengah kaum ajar yang bermukim di gunung tersebut. Setelah Hasanudin berhasil mengislamkan kaum ajar, dan menjadi pemimpin rohani mereka, kemudian ia menyerang Banten Girang dan berhasil merebut kotanya. Berkat kemenangannya, Kesultanan Demak menobatkan Hasanudin sebagai raja baru di daerah Banten. Mengacu pada sumber tersebut.⁸⁴

Saat ditaklukkan Demak, pada waktu itu Banten Girang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Jawa bagian barat di masa lalu dikuasai oleh dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Tarumanegara dan Sunda Kuna merupakan kerajaan yang bercorak budaya India. Keduanya berkembang di wilayah Jawa bagian Barat dalam kurun waktu yang berbeda. Berdasarkan tinggalan arkeologinya, dapat ditafsirkan bahwa wilayah perkembangan kedua kerajaan tersebut berbeda. Kerajaan Tarumanegara berkembang di wilayah Jawa bagian barat sisi utara, meninggalkan prasastinya di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, Kerajaan Sunda berkembang di wilayah pedalaman, terutama di pedalaman Selatan-Timur Jawa Barat. Pertumbuhan dan perkembangan kerajaan masa klasik (pengaruh Hindu-Buddha) di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh India. Hal ini dapat diketahui dari beberapa

⁸⁴Dewi Puspito Rini, “*Struktur Pemerintahan Di Kerajaan Banten Girang*”, dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/2016/01/22/bagaimanakah-struktur-pemerintahan-di-kerajaan-banten-girang/> (diakses pada Jumat, 2 Februari 2018, pukul 21.52 WIB).

aspek pranata kerajaan yang ada. Hampir seluruh pranata kerajaan yang berlaku di India, seperti kedudukan raja yang turun-temurun, kedudukan prameswari, kedudukan pejabat pusat dan daerah, masalah agama, peradilan dan segala urusan sipil lainnya, sedikit banyak ditiru oleh kerajaan-kerajaan masa klasik di Indonesia.⁸⁵

Kekuasaan yang mutlak ditangan seorang raja dilegitimasi dengan dianutnya kepercayaan yang bersifat kosmologi. Dalam konsep kosmologi, terdapat suatu keyakinan bahwa keselarasan antara kerajaan dan jagat raya dapat dicapai dengan menyusun kerajaan sebagai gambaran jagat raya dalam bentuk kecil.⁸⁶ (Nurhadi, 1980). Hal ini membawa implikasi bahwa kekuasaan seorang raja didapatkan dari restu para dewa dan hyang. Posisi seorang raja merupakan representasi dari wakil dewa dan hyang di dunia, yang mendapat mandat untuk berkuasa di dunia. Hal tersebut termuat dalam naskah *Sanghyang Siksakanda ng Karesian*. Naskah yang dibuat tahun 1440 (1518 Maschi) ini menjelaskan tentang kedudukan raja yang berada di bawah para dewa dan hyang.⁸⁷ Seperti kutipan di bawah ini:

*mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata
bakti di hyang.*

Artinya:

⁸⁵Boechari, “*Local Genius dalam Pranata Sosial di Indonesia pada Zaman Klasik*” dalam *Ayat Rohacdi (ed.) Kepribadian Budaya Bangsa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.

⁸⁶Nurhadi Magetsari, “*Masalah Agama dan Kebudayaan dalam Arkeologi Klasik di Indonesia*” dalam PIA III. (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1980).

⁸⁷Dewi Puspito Rini, “*Struktur Pemerintahan Di Kerajaan Banten Girang*”, dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/2016/01/22/bagaimanakah-struktur-pemerintahan-di-kerajaan-banten-girang/> (diakses pada Jumat, 2 Februari 2018, pukul 21.52 WIB).

mangkubumi berbakti kepada raja, raja berbakti kepada dewata, dewata berbakti kepada hyang.⁸⁸

Kerajaan Banten Girang yang bercorak Hindu, yang pada akhir masa pemerintahannya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, besar kemungkinan pranata pemerintahan di kerajaan ini juga merujuk pada pranata kerajaan di India. Namun demikian, hal tersebut baru sebatas praduga, belum diketahui kebenarannya, karena belum ada kajian yang membahas tentang struktur pemerintahan di Kerajaan Banten Girang. Pada awal abad XVI, yang berkuasa di Banten adalah Prabu Pucuk Umun dengan pusat pemerintahan berlokasi di Banten Girang. Adapun Banten Ilir atau Banten Lama pada masa itu berfungsi sebagai pelabuhan.

Ciri pokok gugusan perkotaan Kerajaan Banten Girang terbagi atas dua bagian yang tak terpisahkan, yaitu kota Banten Girang dan pelabuhan Banten, meskipun keduanya berjarak 10 km. Hal ini sesuai dengan konsepsi tentang kerajaan yang berasal dari India, yakni sang raja yang diangkat menjadi dewa hidup atau bakal dewa, secara fisik memisahkan diri dari rakyatnya dan pedagang asing, yang dari segi hukum dan agama merupakan kelompok terasing dalam kerajaan. Pranata tersebut masih terus dipertahankan hingga masa Kesultanan Banten. Pada masa Kesultanan Banten masih ditemukan pemisahan-pemisahan tempat tinggal berdasarkan patokan bangsa maupun profesi yang mengingatkan pada struktur pemerintahan masa sebelumnya.⁸⁹

Tidak banyak yang tertinggal dari sisa-sisa kejayaan Banten Girang. Salah satuinggalan Kerajaan Banten Girang dapat dilihat

⁸⁸Hingga dewasa ini, kajian tentang sejarah Tatar Sunda secara umum memang telah dilakukan oleh para ahli. Namun jika dibandingkan dengan studi sejarah Jawa Kuna masih belum memadai. Artinya, kajian tentang sejarah Sunda Kuna jauh tertinggal dari telaah Jawa Kuna. Lihat Atja dan Saleh Danasasmita, *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian*. (Bandung: Pusat Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981).

⁸⁹Claude Guillot, dkk. *Banten Sebelum Zaman Islam Kajian Arkeologi di Banten Girang*. (Jakarta: Proyek Penelitian Arkeologi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996/1997).

disitus Banten Girang. Situs ini terletak di Kampung Telaya, Desa Sempu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Claude Guillot pada tahun 1988– 1992, situs Banten Girang merupakan situs pemukiman/perkotaan. Penafsiran tersebut berdasarkan pada temuan struktur pertahanan yang berbentuk parit dan dinding tanah dengan pola yang tidak teratur. Diperkirakan situs ini berasal dari abad ke-10 dan mencapai puncaknya pada abad ke-13 hingga 14 Masehi. Periodisasi tersebut mengacu pada temuan keramik asing, keramik lokal, fragmen prasasti, benda-benda logam, mata uang, fosil hewan, batu-batuan, dan manik-manik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Guillot.⁹⁰

Berdasarkan berita Cina dari Dinasti Sung, dikatakan bahwa di kerajaan Mataram terdapat tiga orang putra raja bertindak sebagai raja muda, ada pejabat yang bergelar samgat dan empat rakarayan, yang bersama-sama menyelenggarakan Negara sebagaimana para menteri di Cina. Mereka tidak memperoleh gaji tetap, tetapi pada saat-saat tertentu memperoleh hasil bumi dan barang-barang lain. Kemudian menyusul 300 pegawai sipil, yang dipandang setingkat dengan siu-tsai di Cina, yakni pejabat yang lulus ujian jabatan tingkat terendah. Mereka bertugas mencatat dan mengelola pajak-pajak masuk. Di bawah mereka terdapat 1000 pejabat rendahan yang mengurus tembok dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, lumbung-lumbung padi, dan para prajurit.⁹¹

⁹⁰Biasanya gelar rakai dan pamgat diikuti oleh nama tempat, yaitu nama wilayah kekuasaannya atau “lungguh”nya, yang disebut watak. Pejabat-pejabat di bawah para pangeran, pejabat tinggi kerajaan dan para penguasa daerah yang harus menyelenggarakan pemerintahan di wilayah watak, tidak digaji tetap berupa mata uang melainkan memperoleh daerah lungguh. Lihat Claude Guillot dkk, *Banten Sebelum Zaman Islam Kajian Arkeologi di Banten Girang*. (Jakarta: Proyek Penelitian Arkeologi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996/1997).

⁹¹Biasanya gelar rakai dan pamgat diikuti oleh nama tempat, yaitu nama wilayah kekuasaannya atau “lungguh”nya, yang disebut watak. Pejabat-pejabat di bawah para pangeran, pejabat tinggi kerajaan dan para penguasa daerah yang harus menyelenggarakan pemerintahan di wilayah

Prasasti-prasasti dari masa Jawa Kuna tidak hanya memberikan informasi tentang struktur pemerintahan ditingkat pusat, beberapa prasasti bahkan memberikan keterangan yang terperinci tentang pejabat di tingkat wanua (desa). Keterangan mengenai struktur pemerintahan tingkat desa dijumpai dalam prasasti-prasasti dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura. Terdapat 30 macam jabatan pada struktur pemerintahan desa, namun hanya sepuluh macam jabatan yang sering disebut di beberapa prasasti, yaitu gusti, kalang dan/atau tuha kalang, winēkas, tuha wanua, parujar, hulair, wariga, tuhālas, tuhá wērēh, dan hulu wras. Sayang sekali hingga kini belum ada sumber yang dapat menjelaskan apa fungsi masing-masing pejabat desa tersebut. Ada beberapa jabatan yang dapat diperkirakan arti katanya, seperti misalnya tuha wanua yang berarti kepala desa, hulair (hulu air) yakni orang yang mengurus masalah pengairan di desa, tuhālas yakni pejabat desa yang mengurus hutan yang ada di wilayah desa, wariga adalah pejabat yang dapat menghitung kapan hari baik bulan baik bagi suatu pekerjaan, tuhá wērēh yakni pemimpin muda-mudi desa, parujar adalah juru bicara, winēkas adalah pejabat desa yang bertugas menyampaikan berita kepada penduduk atau desa tetangga, hulu wras adalah pejabat yang mengurus persediaan beras di desa (mengurus lumbung padi), mapkan adalah pejabat yang mengurus pasar, matamān adalah pejabat yang mengurus taman, tuha buru adalah pejabat yang mengurus masalah perburuan binatang di hutan, hulu wuatan adalah pejabat yang mengurus jembatan, serta hulu turus adalah pejabat yang mengurus perbatasan antara desa satu dengan desa lain.⁹²

Naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian yang ditulis pada tahun 1518 memberikan sedikit keterangan yang dapat dipergunakan untuk mengisi kekosongan tentang struktur

watak, tidak digaji tetap berupa mata uang melainkan memperoleh daerah lungguh. Lihat Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto Poesponegoro. *Sejarah Nasional Indonesia II*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

⁹² Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto Poesponegoro. *Sejarah Nasional Indonesia II*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

pemerintahan Kerajaan Sunda Kuno. Di dalam naskah tersebut dituliskan:

... nihan sinangguh dasa prĕbakti ngaranya: anak bakti di bapa, ewe bakti di laki, hulun bakti di pacandaan, sisya bakti di guru, wong tani bakti di wado, wado bakti di mantra, mantra bakti di nu nanggan, nu nanggan bakti di mangkubumi, mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di hyang.

Artinya:

... inilah peringatan yang disebut sepuluh kebaktian: anak bakti kepada bapa, istri bakti kepada suami, rakyat bakti kepada majikan (pacandaan atau tempat bersandar), murid bakti kepada guru, petani bakti kepada pejabat rendahan, pejabat rendahan bakti kepada pegawai, pegawai bakti kepada nu nanggan, nu nanggan bakti kepada mangkubumi, mangkubumi bakti kepada raja, raja bakti kepada dewata, dewata bakti kepada hyang.

Dari kutipan di atas jelas bahwa pejabat yang paling dekat hubungannya di bawah raja adalah mangkubumi. Ia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi atau yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan mengacu pada sumber-sumber di atas, kemungkinan struktur pemerintahan Kerajaan Sunda Kuna pada masa itu adalah sebagai berikut: di tingkat pemerintah pusat, kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, raja dibantu oleh mangkubumi yang membawahi beberapa nu nanggan. Selain itu, terdapat pula putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan sang raja, jika raja meninggal atau mengundurkan diri. Untuk mengurus daerah kekuasaannya, raja dibantu oleh beberapa raja daerah. Apabila raja tidak meninggalkan pewaris tahta, maka salah seorang raja dari raja-raja daerah dapat dipilih untuk menggantikan kedudukan sang raja sebagai raja terbesar.⁹³

⁹³Dewi Puspito Rini, “Struktur Pemerintahan Di Kerajaan Banten Girang”, dalam

Jika kita melihat letak Banten dalam sebuah peta, maka kita akan melihat sebuah ilustrasi pelabuhan ideal dalam buku teks ilmu geografi, memang kota ini terletak di ujung dua jalur maritime internasional, yaitu selat Sunda dan Selat Malaka yang kurang lebih diawasinya bersama jajahannya di Sumatera bagian Selatan. Banten memiliki tempat berlabuh yang cukup besar. Teluknya yang berukuran 18 km x 10 km, dan daerah perairannya ini sangat tenang karena dilengkapi dengan sejumlah pulau berbagai ukuran yang melindunginya dari laut lepas, sungai yang mengairinya bukan saja membentuk sebuah pelabuhan alamiah tetapi juga menjadi suatu jalur komunikasi ke arah lembah pertanian yang merupakan daerah pedalaman.⁹⁴

Menonjolkan ciri khas wilayah yang luas ini, kiranya sangat bijaksana jika kita berpegang kepada sesuatu yang nyata, yaitu bentengnya. Jadi, wilayah ini terletak antara kedua batang air yang membentuk sebuah delta. Delta ini dilintasi lagi oleh batang air ketiga yang membentuk sebuah diagonal dan dengan demikian menghubungkan kedua batang air pertama. Kita semua tahu bahwa struktur kota Banten merupakan hasil keadaan geografis dan ekonomi, serta konteks keagamaan dan sosial. Bertumpu pada hal terakhir ini, sepertinya kota Banten pada awalnya menerapkan konsep kerajaan dan ruang yang mendasari tata kota Jawa kuno. Tampaknya, cara berfikir agama Islam, yang pada saat itu baru saja merayakan kejayaannya, tidak membawa perubahan yang mendasar. Dalam hal ini, sepertinya terdapat dua unsur yang berarti, yaitu pusat dan orientasi.⁹⁵

Struktur kota ini mencerminkan masyarakat dengan cukup jelas, masyarakat bukan hanya terbagi antara orang Banten dan orang asing, tetapi juga antara orang bangsawan, yang hidup dari

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/2016/01/22/bagaimanakah-struktur-pemerintahan-di-kerajaan-banten-girang/> (diakses pada Jumat, 2 Februari 2018, pukul 21.52 WIB).

⁹⁴Claude Guillot, *Banten en 1678*, dalam Jurnal, Archipel. Volume 37, Villes d'Insulinde (II), 1989, 119.

⁹⁵Claude Guillot, *Banten en 1678*, dalam Jurnal, Archipel. Volume 37, Villes d'Insulinde (II), 1989, 151.

penghasilan tanah pertanian mereka dan pedagang-pedagang yang tidak lain adalah orang-orang asing. Tidaklah mengherankan dalam hal ini bahwa masing-masing golongan, terutama bagi mereka yang berkedudukan paling penting pendapat-pendapat mereka sama sekali bertolak belakang tentang kebijakan ekonomi yang dijalankan dikerajaan.⁹⁶ Kerajaan Banten ini tentu saja dikepalai oleh seorang raja yang bergelar Sultan. Keadaan sosial tersebut yang bersifat mendua tercermin di puncak pemerintahan Negara dengan adanya dua perdana menteri, Perdana Menteri: Perdana Menteri “urusan dalam” dan Perdana Menteri “urusan luar”.⁹⁷

Pertama nama Patih Jero (Perdana Menteri “urusan dalam”) yang diberikan kepadanya di lain tempat, jelas bahwa ia benar-benar menangani urusan-urusan “dalam” istana dan keluarga raja (Santana). Di Banten ia bergelar Mangkubumi dan memiliki nama panggilan Pangeran Papatih (atau juga, cara panggilan lama Upapatih), Perdana Menteri kedua, Patih Jaba (“urusan luar”), berasal dari “bukan bangsawan” dan mengenai segala urusan, sepanjang tidak berhubungan dengan kaum bangsawan. Dapat diartikan bahwa ia mempunyai antara lain kewenangan mengenai orang asing, jadi mengenai perdagangan, dan kekuasaannya sangat besar.⁹⁸

⁹⁶Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 108.

⁹⁷Perdana Menteri Bangsawan lebih tinggi tingkatnya, walaupun kurang berkuasa dalam prakteknya. Ia pada umumnya adalah seorang anggota keluarga raja sangat dekat yang bertindak sebagai penasihat utama raja. Selain itu, ia menyelesaikan segala urusan kaum bangsawan. Lihat Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008).

⁹⁸Pemerintahan kolonial memahami benar-benar bahwa ia sebetulnya yang memerintah, sehingga menuntut hak untuk mengangkat Patih Jaba ketika hendak mengawas politik yang dijalankan oleh kerajaan-kerajaan di bagian tengah Jawa. Lihat Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 109.

Perdana menteri ‘urusan luar’ dari Maulana Muhammad berhasil menguasai wali raja dengan bantuan qadi, penguasa agama tertinggi di kerajaan yang juga memegang pimpinan peradilan. Dua tokoh inilah yang tampak diabadikan dalam satu gambar *D’Eerste Boeck*. Perdana Menteri adalah orang yang berpengalaman ia bukan orang muda lagi dan baru memimpin serangan melawan Palembang dari darat, berangkat dari Lampung, sedangkan rajanya memimpin serangan dari laut. Orang tersebut tentunya orang yang dikenal dalam silsilah Jawa, hanya dari gelarnya sebagai wali raja Kiyai Mas Patih Mangkubumi.⁹⁹

Perdana Menteri tetap: jabatan *patih jero* diberikan kepada Pangeran Gabang, nama Pangeran Gabang yang sering muncul dalam berbagai sumber Eropa tetapi tidak dikenal dalam silsilah-silsilah Banten, padahal disebutkan berkali-kali bahwa yang bersangkutan adalah salah seorang saudara laki-laki Maulana Muhammad. Menurut Tiele menyamakannya dengan Pangeran Upapatih, yang memuat dua kali sebutan ‘Pangeran Gabang dan Pangeran Papatih’ yang seakan-akan adalah dua orang yang berbeda, jelas lah hal ini adalah kesalahan dari penyalin Belanda, yang tidak mempunyai pengetahuan tentang gelar-gelar Jawa. Ende menambahkan di antara nama (Pangeran Gabang) dan gelar (Aria

⁹⁹Menurut silsilah-silsilah ini dapat diketahui bahwa ia menikah dengan putri Maulana Hasanuddin, bernama Ratu Wetan, dan bahwa ia menikahkah salah seorang putrinya dengan Pangeran Upapatih salah seorang saudara laki-laki dari Maulana Muhammad. Berdasarkan sumber-sumber Belanda awal dan sejumlah tradisi Banten, seorang putri lainnya telah menjadi istri dari Maulana Muhammad. Maka dapat dipahami bahwa usianya, pengalamannya, demikian juga hubungan kekeluargaannya dengan keluarga raja, membuat orang ini calon yang ideal untuk memimpin kewalirajaan. Namun demikian, keberadaannya dipuncak pemerintahan merupakan suatu hal yang baru sama sekali, dengan demikian Banten menjadi diperintah oleh seorang ponggawa, seorang bukan dari keturunan bangsawan, sebagaimana dinyatakan oleh nama panggilannya Kiyai Mas Patih, serta kedudukannya sebagai *keluarga semenda* saja dalam silsilah-silsilah Banten. Lihat Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. (Jakarta: LP3ES, 2004).

Pepatih).¹⁰⁰ Seperti yang dijelaskan dalam Sajarah Banten bahwasanya struktur pemerintahan Kesultanan Banten dibantu oleh dua Mangkubumi atau Perdana Mentri yaitu Perdana Mentri urusan dalam dan Perdana Mentri urusan Jero.¹⁰¹

1. Sistem Birokrasi Kesultanan Banten

Birokrasi sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.¹⁰² Birokrasi mempunyai dua makna, pertama yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, dan kedua yaitu cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Maksud kedudukan yang cukup penting itu ia mempunyai peranan-peranan yang istimewa didalam masyarakat dan pemerintahan, karena kedudukan dan pentingnya peranan para tokoh agama ini, mereka mempunyai pengaruh yang cukup mendalam dalam kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan.

Menurut Isman Pratama Nasution, dalam penelitiannya "*Kedudukan dan Peranan Tokoh Agama Dalam Birokrasi Kerajaan Islam Banten Abad 16-18*". Mengungkapkan betapa besarnya peranan dan kedudukan tokoh agama (Ulama) di Kesultanan Banten sehingga bisa membantu berjalannya birokrasi pemerintahan di Kesultanan Banten dengan baik, bahkan ketika beberapa Sultan Banten dalam usia kanak-kanak, tidak jarang tokoh agama yang

¹⁰⁰ Penafsiran Tiele dibenarkan *SB* yang menyebutkan bahwa Pangeran Papatih, tinggal di "Pagebangan" artinya di kawasan yang memakai namanya sesuai dengan kebiasaan. Namanya dalam teks-teks *SB* tentu saja adalah gelarnya yang resmi. Pangeran ini, putra Maulana Yusuf yang menikah dengan putri Patih-Wali raja. Mungkin karena pernikahan ini, ia dipilih untuk menduduki jabatan Patih Jero. Lihat, J. P Coen, *Bescheiden Omtrent Zijn Berrijf in Indie*, jilid II, S-Gravenhage. 1920, 601.

¹⁰¹Naskah Sajarah Banten

¹⁰² Lihat Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2003).

menjalankan sementara roda pemerintahan Kesultanan Banten pada waktu itu.¹⁰³

Sedangkan Menurut Claude Guillot dalam bukunya *Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII* di Banten pemerintahan bersifat otokratif. Kekuasaan raja bisa dibilang tak terbatas. Memang terdapat sebuah dewan yang bermusyawarah untuk mengambil keputusan-keputusan penting, khususnya dalam bidang pertahanan. Namun dapat diamati bahwa sistem ini tak pernah berjalan dengan lancar dan sebenarnya ditinggalkan di pertengahan abad ke-17.¹⁰⁴ Padahal tidak ada undang-undang dasar untuk mengatur masalah pergantian raja. Tradisi tampaknya menyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang lahir dari istri pertama dipilih sebagai pewaris tahta Kesultanan.¹⁰⁵

Dapat kita lihat mengenai pergantian raja dengan demikian menjadi sumber pertikaian antara yang merasa berhak yang jumlahnya berlipat ganda dengan adanya poligami. Untuk memecahkan masalah ini penguasa dapat memilih pewaris tahtanya selagi masih hidup. Namun jalan keluar ini tidak dapat memuaskan sepenuhnya karena pewaris tahta ini bisa dicopot setiap saat. Demikian pula kita mengamati kekosongan hukum yang sama dalam penunjukan wali, apabila terjadi krisis pergantian raja dan untuk masalah yang sederhana seperti batasan umur pewaris tahta mencapai usia dewasa. Menurut Claude Guillot tampaknya gejala ini bisa dikatakan bahwa kekosongan tata negara ini adalah penyebab utama ketidakstabilan negara-negara di kawasan ini yang sering menjerumus ke dalam perang saudara ketika harus memilih penguasa baru. Sehingga wali raja mempunyai peran dalam hal ini,

¹⁰³Lihat Isman Pratama Nasution, *Kedudukan dan Peranan Tokoh Agama Dalam Birokrasi Kerajaan Islam Banten Abad 16-18*. (Depok: UI Press, 1993).

¹⁰⁴Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 214.

¹⁰⁵Tetapi pengecualiannya begitu banyak sehingga kita terpaksa menerima bahwa tradisi ini tidak memiliki dasar hukum. Lihat Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008).

dan kebanyakan dari wali tersebut adalah tokoh agama yang mempunyai kedudukan yang penting dalam Kesultanan Banten.¹⁰⁶

Beberapa contoh dampak dari sistem birokrasi yang seperti itu, mengakibatkan beberapa permasalahan dalam Kesultanan Banten baik eksternal maupun internal. Contoh kasus eksternal yaitu adanya persaingan antara saudagar dengan kaum bangsawan, jelas bahwa para saudagar yang memiliki kekuatan ekonomi dengan sendirinya sukar menerima kekuasaan politik yang dipegang oleh kaum bangsawan yang tidak bekerja, arogan, tidak mau membayar hutang, tetapi menghabiskan biaya besar yang harus mereka tanggung. Sebaliknya, kaum bangsawan yang yakin akan hak-haknya, serta bangga akan statusnya sebagai pribumi sama sekali tidak menunjukkan rasa penghargaan terhadap para saudagar yang datang dari luar negeri, dan selain itu menggeluti pekerjaan hina yang menyangkut uang. Jelas bahwa para saudagar merasa sangat berkepentingan berada di Banten, tempat mereka tak mendapatkan saingan setempat, tetapi mereka harus menerima status sosial yang tak diinginkan dan sejumlah penghinaan hak mereka atas perniagaan sepenuhnya tergantung dari kebaikan hati pemerintah dan setiap saat bisa diganggu gugat.¹⁰⁷

Claude Guillot berpendapat bahwa antagonisme ini begitu bermanfaat bagi setiap pihak, sehingga mungkin dicarikan komprominya dan jalan untuk mengatasi pembagian sosial yang terlalu kaku ini. Sebenarnya sikap terbuka ini tak lazim dan adu kekuatanlah yang biasanya berlaku. Setiap kali kekuasaan politik kuat, para saudagar menerima keadaan seperti itu, tetapi ketika pemerintah tampak lemah, mereka berusaha meraih kendali kekuasaan.¹⁰⁸ Contoh dari kasus internal yaitu perang keluarga atau

¹⁰⁶Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 207

¹⁰⁷ Mereka dilarang memiliki lahan tanah bahkan untuk membangun rumah sekali pun. Pada saat meninggal, warisan langsung masuk ke kas kerajaan dan kapal-kapal mereka bisa dan memang pernah disita oleh penguasa dan banyak lagi contoh lainnya.

¹⁰⁸Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 210.

saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putra pewaris tahta kerajaan resminya sendiri, Sultan Haji. Perang ini diawali tahun 1680 dan berakibat campur tangannya Belanda serta akhir dari kemerdekaan Kesultanan Banten. Jelas bahwa konflik internal antara ayah dan anak yang mencetusnya perang ini, tetapi hal ini menarik bagi kita hanya karena perang-perang ini berubah menjadi pilihan ideologi yang bertentangan.¹⁰⁹

Secara sekilas, penyebab yang sama mengakibatkan dampak yang sama pula. Politik yang dianut Banten untuk menjawab tuntutan ekonomi sama sekali tidak jauh berbeda dengan yang dianut negara-negara niaga kecil di Dunia Barat seperti Genova dan Venesia, dengan menggunakan kekerasan untuk mendirikan jajahan yang menjamin kelancaran perniagaan mereka, penyediaan berbagai jenis produk, kebebasan di jalur pelayaran, serta untuk mempertahankan negeri terhadap ancaman perebutan oleh negara-negara yang lebih besar.¹¹⁰

Banten mengalami periode kemakmuran luar biasa di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa selama paruh kedua abad ke-17 berkat dukungan penuh yang diberikan Sultan kepada kedua Syahbandarnya berturut-turut. Kedua orang pria yang sangat pintar ini berhasil menyesuaikan ekonomi negerinya dengan situasi baru yang muncul dengan kehadiran Eropa di Asia Tenggara. Atas saran merekalah ekonominya diberagamkan, perniagaan langsung dimulai, dijalinnya kembali hubungan tradisional dengan China, hubungan yang oleh Belanda diputus selama 50 tahun, dibukanya jaringan

¹⁰⁹ Tampaknya dalam perang saudara ini ditemukan pertentangan mendasar seperti dalam kasus eksternal perang pertama, yaitu “nasionalisme” dari pihak kaum bangsawan melawan “internasionalisme” dari para saudagar. Lihat Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 212.

¹¹⁰ Tidak kalah jauh dan lebih sukar lagi untuk ditelaah dalam birokrasi Kesultanan Banten yaitu penggunaan kekerasan, meskipun berhubungan langsung dengan pokok pembahsan, mentalitas setiap kelompok sosial terhadap penggunaan kekerasan.

niaga yang telah dibicarakan di atas dan yang direncanakan diperluas sampai ke Eropa oleh Banten.¹¹¹ itulah sekilas pembahasan mengenai struktur Kesultanan Banten yang kompleks dan kekuasaan Sultan tidak ada batasnya sebagaimana yang dipaparkan oleh Claude Guillot mengenai struktur Kesultanan Banten.

2. Undang-Undang Kesultanan Banten

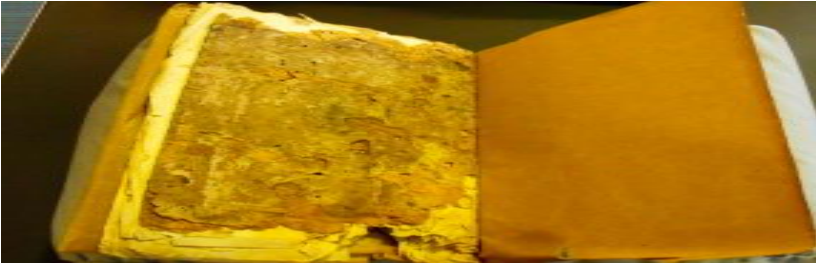
Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan sumber yang mengenai Undang-Undang Kesultanan Banten dari karya Ayang Utriza Yakin, dalam Disertasinya 'Undhang-Undhang Banten: *Étude philologique de la compilation des lois du Sultanat de Bant E n (a Jawa, Indonésie) aux XVII e et XVIII e siècles*, *École des Hautes Etudes en Sciences Sociales* (EHESS), 2013 di Prancis. Yang kemudian diterbitkan dalam bentuk jurnal yang berjudul “*Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*”.¹¹²

Menurut Ayang Utriza Yakin *Undhang-Undhang Banten* adalah teks *hybrid* yang terdiri dari 11 teks terikat bersama-sama dalam satu naskah kuno. Bagian yang beragam termasuk teks 65 halaman diaksara Jawa yang ditulis setelah 1755 dan sisanya 162 halaman dalam tulisan Arab yang tertulis setelah 1815. Bagian utama dari teks sebanyak 227 halaman yang ditulis dalam bahasa Jawa sementara 11 halaman ditulis dalam bahasa Melayu.¹¹³

¹¹¹Lihat Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008).

¹¹²Lihat Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388. Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016, 376.

¹¹³Hal ini sesuai dengan naskah yang aslinya berjumlah 238, yang berisi hukum adat (*dirgama*) masyarakat Banten Jawa, peradilan warisan Kesultanan Banten sebelum kedatangan Islam, Hukum Islam dan hukum Eropa. Lihat Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388. Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016.



Gambar (1) Sampul naskah Undang-Undang Banten adalah dari karton kuning-coklat, bagian luar depan dan belakang penutup telah rusak parah dan keduanya memiliki banyak lubang-lubang kecil karena dimakan rayap atau serangga lain dan bagian dalam sampul tersebut telah memburuk.¹¹⁴

Dengan tulisan Arab yang menggambarkan *'iman'*, *'Islam'*, dan *'ihсан'*. Naskah Undang-undang Banten yang berisi catatan yang digunakan sebagai pengikat bahan untuk memegang halaman naskah bersama-sama dan tidak ada hubungannya dengan isinya. Deskripsi mengenai naskah dalam kajian Ayang Utriza Yakin bahwsanya pada bagian atas luar sampul belakang, selembar kertas kecil telah terpaku mengandung label '93 5598' yang ditambahkan oleh pustakawan dan tidak berhubungan dengan naskah. Mengikat naskah terikat dengan benang hitam dan putih menggunakan tradisional tangan mengikat teknik.

Begitu mereka telah terikat oleh benang, mereka berkumpul dan direkatkan, dan kemudian tertutup. Tulang belakang naskah telah menghilang dan diganti dengan selembar kertas besar coklat dari jenis yang sama yang digunakan untuk membungkus penutup. coklat kertas mungkin ditambahkan oleh bagian konservasi perpustakaan. Kecuali untuk tulang belakang sisa penutup di tempat, tapi rusak parah. Dimensi naskah, halaman dan penomoran naskah kertas dan teks memiliki dimensi 31 × 20 cm dan 24 × 14 cm

¹¹⁴Sumber: Cod.Or. 5598, *Undhang-Undhang Banten*, University of Leiden Library, diambil dari artikel Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388. Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016.

masing-masing. 17 Naskah memiliki 227 halaman dan 22 halaman memiliki halaman asli Gambar sampul 1 depan dibungkus kertas untuk melindungi naskah dari degradasi.¹¹⁵

Jumlah ditulis dalam huruf Arab disudut atas dan bawah dari halaman ganjil. Paling halaman tidak memiliki penomoran halaman asli tapi pada nomor halaman. Ini penomoran menambahkan, dalam angka Arab, berada di sudut-sudut atas dari sisi folio. Itu mungkin yang bernomor halaman dari pertama ke teks terakhir dari naskah pensil. Bahkan angka-angka ini kecil dan sempit dan berbeda dalam gaya dari sisa teks. Penulisan angka mirip dengan tulisan tangan yang dapat ditemukan pada halaman 120, '94/93 Hijrah 1269', yang telah dilakukan di pensil dan ditemukan di bawah teks, dan dapat diidentifikasi sebagai tangan oleh Pigeaud.¹¹⁶

Naskah hampir seluruhnya ditulis dalam bahasa Jawa dengan pengecualian dari 11 halaman yang ditulis dalam bahasa Melayu. Teks ditulis dengan tinta hitam dengan pengecualian halaman 156, yang berisi dua baris dari ayat Al-Qur'an dengan tinta merah. Ini adalah kemungkinan bahwa *ara kabut* (penguasa) digunakan untuk membuat keputusan itu untuk menulis. Naskah ini tidak memiliki ilustrasi atau iluminasi. Tiga jenis tulisan telah digunakan dalam naskah: Jawa, *pegon* (Tulisan Arab disesuaikan dengan aturan fonologi Jawa).¹¹⁷

¹¹⁵Lihat Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388. Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016.

¹¹⁶Lihat Graaf and Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa*. (Jakarta: Grafitifers, 1986).

¹¹⁷Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388. Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016. 17.



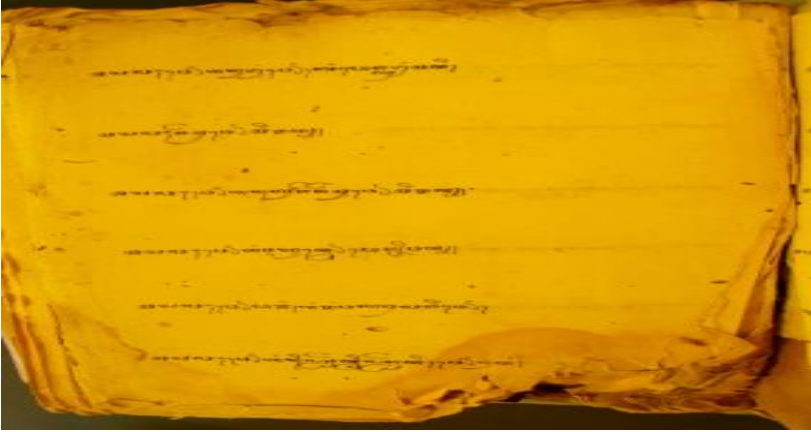
Gambar (2) Di sisi kiri bagian dalam sampul depan adalah catatan yang ditulis dalam aksara Arab. Selain itu, pada bagian dalam sampul belakang selembar kertas yang terpaku pada karton 13.¹¹⁸



Gambar (3) Tulisan Arab disesuaikan dengan aturan fonologi bahasa Melayu.¹¹⁹

¹¹⁸Sumber: Cod.Or. 5598, *Undhang-Undhang Banten*, University of Leiden Library, diambil dari artikel Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388. Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016.

¹¹⁹Sumber: Cod.Or. 5598, *Undhang-Undhang Bantĕn*, University of Leiden Library, diambil dari artikel Ayang Utriza Yakin, *Undang-*



Gambar (4) Setiap halaman memiliki 6 sampai 7 baris spasi baik.¹²⁰

Deskripsi konten.

Berbagai teks dalam naskah perbedaan bahasa, aksara, dan tanggal dalam naskah, mengungkapkan bahwa itu tidak terdiri dari teks tunggal tetapi beberapa teks berkumpul bersama. meskipun satu dengan jelas dapat membedakan bagian-bagian komponennya yang berbeda. Hal ini terdiri sebagai berikut:

1) Masalah Undhang-Undhang

Teks pertama adalah *Masalah Undhang-Undhang* yang terdiri dari 65 halaman dari 33 folio bernomor secara terpisah oleh

Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu, 44: 130, 365-388. Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016.

¹²⁰Sumber: Cod.Or. 5598, *Undhang-Undhang Banten*, University of Leiden Library, diambil dari artikel Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388. Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016.

Pigeaud.¹²¹ Ini adalah bagian tertua dari naskah, dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, berdasarkan cap air kertas, dan teks ini telah disalin setelah tahun 1755, sementara yang lain disalin setelah 1815. Teks yang berisi apa yang tampaknya menjadi daftar artikel atau bahkan daftar isi. Namun, itu bukan indeks untuk isi *UUB*. Sementara banyak item pada daftar tentu merujuk pada artikel di berbagai teks naskah, dari 399 halaman, hanya 160 halaman sesuai dengan artikel yang sebenarnya terkandung dalam *UUB*. Dengan kata lain, 160 artikel ini sesuai semua ditemukan dalam bagian berikutnya dan beberapa 240 item dari daftar ini tidak dapat ditemukan dalam naskah. Kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah indeks dari buku sebelumnya yang hilang atau tidak diketahui yang kurang dari setengah disalin ke dalam naskah ini.¹²²

(2) *Undhang-Undhang Sultan Haji*

Teks kedua adalah hukum Sultan Haji (1682-1687). Ini adalah 26 halaman yang panjang (pupuh 1-26) dan terdiri dari 46 artikel. Ini tanggal kembali ke zaman Sultan Abu Nasar Abdul Kahar, yang dikenal sebagai Sultan Haji. Namun, juga mencakup tiga artikel (12, 43, dan 45) terkait dengan pemerintahan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682). Teks tidak memiliki judul, namun beberapa bagian menunjukkan bahwa hukum itu dikeluarkan pada masa Sultan Haji. Ada 24 bukti yang menunjuk pada fakta bahwa teks-teks penyalin berasal dari Banten. Temuan penelitian mengkonfirmasi peran Banten sebagai pusat utama untuk menyalin manuskrip Islam dan pengaruhnya diseluruh kepulauan Indonesia.¹²³ Teks adalah kumpulan artikel yang ditujukan kepada seluruh lapisan

¹²¹Pigeaud, *Sastra Jawa, raisonné katalog naskah-naskah Jawa di perpustakaan dari Universitas Leiden dan koleksi publik lainnya di Belanda*. Vol 2. The Hague: M. Nijhoff. 1968.

¹²²Lihat Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388. Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016.

¹²³Lihat Wieringa, *Menghiasi dan menembus surat itu; asal Jawa yang Syair Scribu Masalah dan ejaan Banten. Bijdragen tot de TaalLand-en Volkenkunde* 159, 2003.

masyarakat. Sepintas tampaknya cukup heterogen, tapi hati-hati membaca menunjukkan bahwa itu adalah tentang peraturan pertanian untuk hubungan antara strata sosial yang beragama dan kekuasaan raja di Kesultanan Banten.¹²⁴

(3) *Undhang-Undhang Sultan Zainul Abidin*

Teks ketiga adalah hukum Sultan Zainul Abidin (1690-1733). Ini adalah 49 halaman panjang (pupuh 26-75) dan secara tersurat menyebutkan bahwa itu terdiri dari 80 artikel dalam serangkaian undang-undang yang berasal dari pemerintahannya (*UUB*: 26). Bagian ini berisi dua kolofon yang berbeda. Kolofon pertama adalah pada pupuh 73: '*Dhawuhing undhang-undhang ing dina itu nayn Tanggal ping kalih wulan Jum ā d i al-Ah ir Tahun J I m 1191 Hijrah. Wa Semua ā hu sebuah 'lam'*' (hukum itu berlaku pada hari Senin kedua bulan Jumadi al-Ahir dari 1191 AH (8 Juli 1777), tahun Jim. Allah adalah maha tahu). Kolophon kedua adalah pada pupuh 74, '*Wulan Jum ā d i ... sanat 1111*' (bulan Jumadi) tahun 1111 AH (antara akhir Oktober untuk Desember 1699). Kolofon mengungkapkan bahwa penerusnya kembali diberlakukan hukum Sultan Zainul Abidin setelah kematiannya, dan bahwa mereka masih berlaku hingga 1777.¹²⁵

(4) *Undhang-Undhang Sultan Zainul Arifin*

Teks keempat adalah hukum Sultan Zainul Arifin (1733-1748). Ini adalah 13 halaman panjang dan terdiri dari 22 artikel hukum yang dikeluarkan oleh Sultan Abul Fath Muhammad Syifa Zainul Arifin (*UUB*: 75), dan memberlakukan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan ayahnya, Sultan Zainul Abidin, dan kakeknya, Sultan Haji (*UUUB*: 79). Bagian ini berisi dua kolonisasi

¹²⁴Lihat Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388. Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016.

¹²⁵Teks pada bagian ini adalah kumpulan terkait kasus tetapi hukum mengatur urusan sipil dari semua individu dalam masyarakat Banten.

yang pertama adalah pada pupuh 75: *'Ing dina Arba' Tanggal ping 5 saking wulan Rab i' u al-Awwal Tahun D ā l 1151 hijrah, kala iku Kangj e ng ā Sult n Ab u al-Fath Muh Ammad Š jika ā Zayn al' Â rif Aku n andhawuhak E n undhang - undhang'* (Pada hari Rabu, tanggal lima bulan Rabī'u al-Awwal tahun 1151, tanggal 23 Juni 1738. Mulia Sultan Abul Fath Muhammad Syifa Zainul Arifin diberlakukan yang hukum). Yang kedua adalah pada pupuh. 87: *'Hijratu al-Nabi s semua ā Semua ā hu' alaihi wa sallam sewu satus sek ě t tunggal lumampah ing Tahun D ā l ing sasi Jum ā d i al-Awwal Tanggal wolu ... Banten alat sebuah waqtu Zuhur ahir'* (Di Banten pada Selasa sore ... kedelapan dari bulan Jumadi al-Awwal, 1151, tahun Dal [8 Agustus atau 3/13 September 1738). Teks diarahkan pada orang-orang Lampung dan mengatur hubungan mereka dengan Sultan Banten serta produksi merica dan perdagangan di Lampung.¹²⁶

(5) Undhang-Undhang Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir

Teks kelima berisi hukum Sultan Abul Mafakhir Abdul Kadir (1596-1651). Ini adalah 8 halaman panjang (pupuh 88-95) dan terdiri dari 11 artikel yang berhubungan dengan hukuman diskresioner (*Ta'zir*) seperti yang direkomendasikan oleh *syariah* (*UUB*: 88) dan yang diterapkan oleh Sultan Banten. Itu teks menyatakan bahwa hanya Sultan memiliki kewenangan untuk mengucapkan vonis berdasarkan *ta'zir*, dinada yang sama, ia memiliki hak *preogatif* untuk menambah atau mengurangi sanksi dan hukuman. Dia juga satu-satunya yang memiliki hak untuk menggunakan *ijtihad* (interpretasi pribadi) di membuat keputusan atau dalam mengucapkan vonis sementara berunding dengan para penasihatnya.¹²⁷

Perlu dicatat di sini bahwa kemungkinan beralih ke hukuman diskresioner tidak diberikan kepada *Pertanyaan*: Saya (ahli

¹²⁶Lada adalah sumber utama pendapatan Kesultanan Banten.

¹²⁷Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388. Universit  Catholique de Louvain, Belgia, 2016, 374

hukum) tetapi hanya untuk sultan. Jadi, menurut teks ini, sultan tidak hanya otoritas dalam politik tertinggi tetapi juga otoritas hukum tertinggi. Kita tahu bahwa Banten memakai hukuman diskresioner pada masa pemerintahan Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (*UUB*: 92).¹²⁸

(6) Undhang-Undhang Kyai Arya Mangunjaya

Teks keenam adalah hukum Kyai Arya Mangunjaya (1651-1680). Ini adalah 4 halaman yang panjang (Pupuh 95-8) dan berisi 5 artikel disusun oleh Perdana Menteri Kyai Arya Mangunjaya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dari (1651-1682).¹²⁹ Selama Kyai Mangunjaya menjabat menjadi Perdana Menteri, Kesultanan Banten adalah sebuah negara merdeka dan menikmati total kebebasan di semua tingkatan: politik, hukum, dan komersial. Perdana Menteri diundangkan hukum bahwa kekuasaan politik Banten yang diinginkan pada saat itu. Pada pandangan pertama, teks tampaknya terdiri dari kasus yang tidak terkait, tapi sebenarnya itu berpusat di sekitar satu tema umum, yaitu peraturan yang berkaitan dengan kasus kriminal antara orang-orang Banten.

(7) Kitab Perjanjian Kumpeni Lan Sultan Haji

Teks ketujuh adalah perjanjian antara VOC dan Sultan Haji dan 9 halaman panjang (Pupuh 98-106). Latar belakang perjanjian ini tanggal kembali ke 1682 ketika perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Putra Mahkota Sultan Haji. Yang terakhir ini mengajukan banding ke Belanda untuk menghancurkan pasukan ayahnya. Mereka lakukan dan ia menggantikan tahta ayahnya yang sangat lama. Belanda membuat beberapa tuntutan Banten di balasan

¹²⁸ Lihat Budi Sudrajat, *Tinjauan Sejarah Tentang Kebijakan Sultan Abul Mafakhir Abdul Qadir (1596- 1651)*, Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002.

¹²⁹ *UUB*, 95.

atas dukungan mereka. Tiga perjanjian ditandatangani pada 1682, 1684, dan 1686.¹³⁰

Perbandingan antara teks perjanjian di *UUB* dan Perjanjian 1686 seperti yang ditemukan dalam hubungan yang menunjukkan bahwa yang pertama hanya berisi 12 artikel, sementara yang asli memiliki tidak kurang dari 35. artikel di *UUB* identik, tapi di Jawa, dan adaptasi daripada terjemahan 35 artikel. Siapa pun ditugaskan terjemahan, mungkin qadi Banten, ditinggalkan 23 artikel dan dipertahankan hanya 12.¹³¹ Komisaris salinan naskah ini mungkin sengaja ingin memiliki masing-masing dari Kesultanan Banten wajib dihapus, termasuk yang di pembatasan perdagangan budak, kapas, lada hitam dan putih, yang memerlukan kapal untuk mendapatkan aliansi dari otoritas maritim Belanda, pemantauan perdagangan 'ilegal', kontrol atas budak dan imigrasi, serta keterbatasan pada hubungan internasional dan kontak dengan dunia luar.¹³²

Catatan pada naskah *UUB* adalah kumpulan teks-teks hukum ketentuan yang berbeda, yaitu beberapa membahas hukum, salah satu 'perjanjian internasional', dan satu perjanjian dengan VOC. Mungkin qadi Banten atau salah satu pejabatnya mengumpulkan gelar tersebut bersama-sama dan telah mereka terikat ke dalam naskah tunggal yang telah kemudian sampai kepada kita dan sekarang diawetkan sebagai Cod.Or. 5598 *Undhang-Undhang Banten* di Leiden. Lebih penting lagi, teks-teks dalam

¹³⁰Bagian dari perjanjian 1686 dimasukkan sebagai teks ketujuh dalam naskah *UUB*.

¹³¹Isi dari 12 termasuk dalam larangan keprihatinan naskah tentang pejabat VOC dan aturan kadi bisa menegakkan, misalnya, dalam kasus pemerkosaan seorang wanita Banten oleh petugas VOC atau intrusi VOC mabuk prajurit dari masjid. Sebaliknya, 23 artikel dari perjanjian yang tersisa dari naskah, pada dasarnya, kekhawatiran kewajiban Sultan Banten.

¹³²Hal ini sangat mungkin bahwa salinan ini diperintahkan dan digunakan oleh qadi yang ingin memiliki salinan artikel dari Perjanjian 1686 hanya untuk membantu dia untuk tiba di vonisnya pada konflik antara Banten dan Belanda.

naskah kuno ini tampaknya telah dikumpulkan dan terhubung di bawah gagasan 'hukum' dalam budaya yang unik dan tradisi hukum. Hukum Di Banten, sebagaimana tercermin dalam teks-teks ini, merupakan ekspresi dari kebanyakan konstruksi sosial yang meliputi sistem pemikiran, agama, etnis, mekanisme hukum dan sosial moralitas. Inilah yang menjadi landasan kuat Kesultanan Banten dengan adanya Undang-Undang Banten dalam melaksanakan hukum di pemerintahannya.¹³³

Dalam hal ini, menjadi jelas bahwa *UUB* adalah jenis yang sangat khusus dokumen atau 'hukum'. Aspek pertama adalah bahwa *UUB* tidak ditulis secara sistematis, yang kedua adalah bahwa tidak lengkap di semua cabang hukum, bahkan dalam bidang ketentuan hukum, yang ketiga adalah kurangnya gaya formal dan inkonsistensi dari isinya. Akhirnya, sebagian besar hukum di *UUB* yang tampaknya ditulis tanpa rencana terbentuk sebelumnya dan tanpa urutan tertentu. Tidak ada Konsep utama dalam arti bahwa tidak ada upaya telah dilakukan untuk mengucapakan prinsip umum yang dapat menangani kasus-kasus tertentu.¹³⁴

Tampaknya bahwa *UUB* tidak dalam dirinya 'kode hukum' dari Kesultanan Banten, namun catatan tertulis dari hukum adat yang berlaku pada saat itu. Ini adalah akumulasi dari kasus yang mungkin dapat digunakan sebagai legalisasi untuk menangani kasus-kasus masa depan. Hal ini jelas kompilasi di cenderung untuk penggunaan praktis. Seperti kita ketahui, koleksi hukum ini tentu milik seorang hakim di Banten, yang fungsional penunjukan itu qadi dan yang resmi judul itu kiyai *Faqih Najmuddin* dan untuk siapa itu mungkin menjabat sebagai dasar hukum untuk membuat penilaian. Sebagian besar isi dari ini 'kompilasi hukum' terdiri dari hukum adat (dirgama) dan berhubungan kasus perdata dan pidana. Beberapa 265 artikel dari 335 (80%), dalam kompilasi ini berasal dari hukum adat. Pada dasarnya, ini adalah kebiasaan orang Jawa disesuaikan

¹³³Cod.Or. 5598 *Undhang-Undhang Banten*

¹³⁴Lihat Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388, dalam jurnal Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016.

dengan waktu dan tempat, dan konsekuensi hukum yang diberikan.¹³⁵

UUB hanya tertulis hukum adat bahwa Sultan memilih untuk menegakkan hukum sebagai ‘negara’. Dengan menggunakan teks ini, qadi Banten, meskipun judul Islamnya, disebut hukum adat Jawa untuk membuat keputusannya. Keputusan qadi Banten untuk mengadopsi hukum adat sebagai sumber utamanya harus dianggap sebagai upaya individu dan sebagai interpretasi pribadi (*ijtihad*) untuk melengkapi dua sumber utama, yaitu *Al-Qur’an*, *Hadist* atau *Sunnah*. Dan akan mengerti dengan baik bahwa menurut teori hukum Islam, di bawah konsep ‘*urf*’ dan adat diizinkan untuk lulus penilaian dan membuat keputusan berdasarkan hukum adat.¹³⁶

Sementara sampai akhir abad ke-9, para ahli hukum Islam (*fuqaha*) telah menolak hukum adat sebagai sumber formal hukum Islam, terutama orang-orang dari sekolah Madzhab Hanafi. Perlu dicatat bahwa hukum adat juga telah diterima secara luas dan digunakan di kekaisaran Ottoman dari abad ke-16. Dengan demikian qadi Banten, mengambil hukum adat sebagai sumber utamanya, tidak melanggar hukum Islam. Seperti ide dari hukum adat, hukum Islam 54 mewakili beberapa 52 (15%) dari 335 artikel yang ada di *UUB*. Dalam Buku Sumber hukum ini, hukum Islam Penawaran terutama dengan hukum Islam waris (29 artikel) dan hukuman kebebasan untuk menentukan pilihan (11 artikel), serta beberapa artikel 12 pada hukum keluarga dan kewajiban ritual.¹³⁷

¹³⁵Sementara *UUB* memberi kita satu-satunya sumber hukum adat dari Banten yang telah bertahan dari waktu itu, hukum adat lain mungkin ada yang kita renote cordedin kompilasi ini.

¹³⁶Lihat Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388, dalam jurnal Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016

¹³⁷Ayang Utriza Yakin, *Undang-Undang Banten, Indonesia dan Dunia Melayu*, 44: 130, 365-388, dalam jurnal Université Catholique de Louvain, Belgia, 2016, 20.

D. Tingkatan Masyarakat Di Kesultanan Banten

Kesultanan Banten mempunyai struktur sosial di dalam masyarakatnya yang bercorak tradisional. Untuk menentukan lapisan-lapisan penduduk kota masyarakat tradisional atau praindustri tersebut berdasarkan sistem status sosialnya tidaklah mudah. Menurut Sartono Kartodirjo berpendapat bahwa penerapan definisi tentang pengertian status yang ada, yang biasanya berlaku bagi masyarakat industri akan sangat meragukan. Diferensiasi dan stratifikasi sosial dalam masyarakat tradisional jauh lebih sederhana daripada masyarakat industri. Lain daripada itu, peranan sosial dan status yang menyertainya jelas merupakan suatu fenomena kultural, karena itu harus diingat sifat relatif dari kriteria status.¹³⁸

Relatifitas kriteria untuk menentukan status sosial lapisan atau golongan di masyarakat, misalnya berdasarkan suatu segi politik dapat pula berdasarkan segi-segi lainnya seperti ekonomi, keagamaan, atau kulturasi. Suatu contoh dari segi politik raja dapat digolongkan dalam status sosial pemegang kekuasaan tertinggi di antara golongan tersebut. Tetapi jika didasarkan kriteria ekonomi, raja termasuk pula kepada golongan yang kehidupan ekonominya tertinggi, karena raja-raja pada zaman tersebut baik secara langsung atau tidak langsung menentukan nasib perekonomian dan perdagangan dengan segala peraturannya.

Contoh lain, sekelompok anggota masyarakat dapat digolongkan sebagai ulama ada pula yang memegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, sehingga mereka dapat digolongkan kepada elite birokrat. Jadi jelas dalam kriteria untuk menentukan status sosial golongan masyarakat bersifat relatif. Meskipun demikian dengan relatifitas tersebut dapat dijadikan pedoman dalam uraian selanjutnya, maka golongan masyarakat kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia salah satunya yaitu di Kesultanan Banten, dapat dibagi menjadi empat golongan pertama Golongan Raja-raja dan

¹³⁸ Lihat Sartono Kartodirjo, *Struktur Sosial Masyarakat Tradisional dan Kolonial, Lembaran Sejarah no.6*. (Yogyakarta: Seksi Penelitian Sejarah Jurusan Sejarah UGM, 1986).

Keluarganya, kedua Golongan Elit, ketiga Golongan Nonelite, keempat Golongan Budak.¹³⁹

1. Golongan Raja-raja dan Keluarganya

Golongan raja dan keluarganya bertempat di kediaman raja-raja, baik yang berkedudukan sebagai raja besar atau maharaja maupun sebagai raja kecil ialah keraton atau istana. Dari keraton itulah raja menyebarkan pemerintahan atau kekuasaannya. Gelar raja atau maharaja zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam masih digunakan pada beberapa kerajaan, disamping gelar sultan akibat pengaruh Islam seperti halnya Kesultanan Banten hampir semuanya raja menggunakan gelar sultan.¹⁴⁰

Selain gelar raja atau sultan di Jawa dan kerajaan yang terpengaruh olehnya, terdapat pula gelar yang lain seperti adipati atau pati, pangeran, panembahan dan susuhunan untuk raja-raja Muslim pada zaman peralihan Indonesia Hindu ke Islam ternyata ada hubungannya dengan gelar-gelar untuk penguasa-penguasa kerohanian. Pangeran adalah gelar untuk Wali, gelar Susuhunan atau panembahan mempunyai nilai kerohanian yang kuat. Gelar-gelar tersebut setelah Islamisasi dipakai raja-raja untuk mempertinggi gelar pati yang mula-mula diperolehnya.¹⁴¹ Raja-raja di Banten ada

¹³⁹ Pembagian golongan tersebut, tidak lain untuk lebih memungkinkan keleluasan mengklasifikasikan golongan pejabat pemerintahan, ulama, pekarya atau tukang-tukang, pedagang serta petani. Lihat Sartono Kartodirjo, *Struktur Sosial Masyarakat Tradisional dan Kolonial, Lembaran Sejarah no.6*. (Yogyakarta: Seksi Penelitian Sejarah Jurusan Sejarah UGM, 1986).

¹⁴⁰ Gelar sultan pertama kali di Indonesia dipergunakan oleh Sultan Malik as-Saleh seperti ternyata di nisan kuburannya tahun 696 H (1297 M) yang terdapat di Gampong Samudra, bekas Kerajaan Samudra Pasai, kabupaten Lhokseumawe, Aceh. Lihat Uka Tjandrasasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII Sampai XVIII Masehi*. (Kudus: Menara Kudus, 2000), 81.

¹⁴¹ Hal itu sesuai dengan dugaan bahwa tidak hanya raja-raja beragama Hindu saja tetapi juga golongan Muslim yang mempunyai kedudukan kerohanian yang tinggi dipandang sebagai sumber dan nasal

beberapa yang memakai gelar maulana yang berarti tuan atau penguasa, seperti Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad. Gelar tersebut sebenarnya telah dipakai pada abad ke-15 M. oleh Maulana Abdul rahman Taj'ul Daulat Quthbul Ma'ali al-fasi (wafat 816 H) di Pasai dan Maulana Malik Ibrahim (wafat 822 H) di Gresik.

2. Golongan Elite

Menurut Tb. Bottomore, dalam masyarakat kerajaan tradisional, baik dipusat maupun di luar pusat kerajaan, terdapat segolongan masyarakat yang status sosialnya dipandang tinggi karena fungsinya atau terutama karena pekerjaannya, yaitu yang kita sebut golongan elite.¹⁴² Golongan elite merupakan kelompok orang yang menempati lapisan atas, nominal dapat terjadi dari golongan aristokrasi, tentara, keagamaan, pedagang dan plutokrasi.¹⁴³ Telah disebutkan bahwa dalam masyarakat kerajaan tradisional pemisahan mutlak di antara golongan elite sendiri adalah kaum aristokrat atau kaum bangsawan yang menempati suatu jabatan pada pemerintahan sebagai golongan elite birokrat.

Menurut Husein Djajadiningrat, kalangan priyayi di Banten adalah untuk menyebutkan pegawai-pegawai atau mantra.¹⁴⁴ Golongan priyayi dan bangsawan ada pula yang memangku jabatan sebagai mangkubumi, perdana menteri, atau orang kaya besar, sebagai menteri, ponggawa, bendahara, laksamana, senopati, adipati, tumenggung dan lain-lain. Itu terjadi sebagai kebiasaan

kekuasaan, dalam hal ini mungkin raja, sultan atau wali dalam Islam. Sesudah penghapusan Hinduisme, maka golongan kerohanian Islam dianggap penguat khusus tenaga-tenaga gaib.

¹⁴²Tb. Bottomore, *Ellites and Society. A Pelican Book*. Penguin Book Ltd: Great Britain, Reprinted, 1970), 14.

¹⁴³Pendapat Pareto dikutip dari Tb. Bottomore, *Ellites and Society. A Pelican Book*. (Penguin Book Ltd: Great Britain, Reprinted, 1970), 10.

¹⁴⁴Lihat Husein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sedjarah Banten*. (Jakarta: Djambatan, 1983).

kaum priyai dan bangsawan menempati jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan, maka hal itu sesuai dengan tradisinya.

Raja atau Sultan mempunyai kebiasaan menempatkan keluarga dan kerabatnya dalam struktur birokrasi. Dengan demikian usaha tersebut dianggap dapat memperkokoh kedudukannya dibidang politik, ekonomi bahkan kultural di antara golongan raja dan keluarga bangsawan itu. Dalam beberapa hal seseorang dapat menempati kedudukan sebagai elite birokrat, misalnya karena mobilitas vertikal, ia diangkat oleh raja atau sultan karena kecakapannya, menunjukkan kesetiaan kepada kepentingan raja, berjasa dalam perang. Tetapi mungkin juga seseorang dari rakyat lambat laun dapat memasuki golongan elite birokrat, karena melalui perkawinan dan kemudian mengikuti cara-cara hidup kaum bangsawan yang termasuk elite birokrat itu.

Beberapa kerajaan tradisional di Indonesia pernah menjadikan orang-orang asing sebagai syahbandar, maka hal itu berarti bahwa orang asing juga dapat menempati kedudukan golongan elite birokrat dalam suatu kerajaan, misalnya di Banten orang India, Cina dan Gujarat di Batavia, orang Jepang di Cirebon. Hal itu mungkin karena orang-orang asing dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang perdagangan dan hubungan internasional, dalam fungsinya syahbandar tidak hanya mencakup soal-soal yang berhubungan dengan orang-orang asing saja tetapi juga dalam hubungan antarnegara. Dalam hubungan antarnegara, syahbandar mempunyai fungsi yang mencakup semua bentuk kegiatan umum yang bersifat internasional, misalnya legalisasi, judikasi, kepolisian dan administrasi.¹⁴⁵

¹⁴⁵Telah dikatakan pada bagian sebelumnya bahwa syahbandar asing juga memiliki pengetahuan bahasa, sehingga memudahkan pula dalam hubungan-hubungan internasional. Di antara syahbandar, lambat laun ada yang memasuki lingkungan aristokrasi atau golongan bangsawan, dan kemudian hidup menurut adat kaum bangsawan. Perkawinan antara keluarga bangsawan dengan syahbandar, bahkan juga dengan pedagang-pedagang besar termasuk elite pedagang dapat pula terjadi, mengingat status ekonomi. Dalam proses Islamisasi justru antara lain melalui perkawinan antara beberapa putri adipati dengan beberapa pedagang besar

Dalam masyarakat pusat kerajaan seringkali kita ketahui adanya golongan keagamaan yang menempati posisi sosial tinggi. Mereka ini antara lain terdiri dari beberapa orang ulama, orang-orang yang dianggap wali. Dan ada juga dari mereka yang menjadi penasihat sultan-sultan. Di Jawa pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam dalam cerita-cerita dikenal adanya Wali Sanga yang mempunyai peranan, bukan hanya dalam bidang dakwah Islamiyah saja tetapi juga dalam bidang politik dan budaya. Di antaranya bahkan menjadi penguasa atau raja seperti Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati dan dengan julukan *ratu pandita*.¹⁴⁶

Meskipun demikian dapat dicatat bahwa pengaruh golongan elite keagamaan misalnya Walisongo maupun ulama-ulama terkenal bukan hanya terbatas pada golongan raja dan bangsawan di lingkungan keraton saja, tetapi juga pada golongan atau lapisan penduduk umum. Dengan demikian pemisahan antara golongan elite keagamaan dengan elite politik relatif. Mereka yang tergolong elite dengan substratum elite politik elite birokrat, elite pedagang, elite keagamaan, dengan masyarakat jauh lebih sedikit jika dibandingkan

itu. Di lain pihak adipati-adipti juga merupakan elite birokrasi pemerintahan pusat. Sedang dari sudut politik, mereka merupakan elite politik di daerahnya. Setelah adipati-adipati tersebut mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat muncullah pula mereka sebagai penguasa yang melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang bercorak Indonesia Hindu dan akhirnya mendirikan kerajaan bercorak Islam. Lihat Purnadi Poerbatjaraka, *Syahbandar in the Archipelago*. JSEAH, Vol. 2, No. 2 Juli 1961, 1-9.

¹⁴⁶Seperti diketahui bagaimana pengaruh kaum ulama terkemuka dalam pemerintahan pada masa kemudian setelah tidak ada wali-wali. Sama halnya dengan Syaikh Yusuf, seorang ulama dari Makassar pada abad ke 17 pernah menjadi penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa. Lihat Brandes, dan Rinkes, *Babad Tjirebon*. Uitvoerig inhoudsopgave en noten: VBG. LIX, 1911, 104.

dengan golongan atau lapisan penduduk lain yang termasuk nonelite.¹⁴⁷

Menurut Willem Lodewycksz tahun 1596, Masyarakat kota di Banten dibagi atas beberapa bagian dimana ditempatkan seorang bangsawan. Di setiap rumah bangsawan ada 10 atau 12 orang penjaga setiap malam. Di bagian depan rumah mereka terdapat *paseban*, tempat beraudiensi orang-orang yang memerlukan atau memintanya. Di bagian depan paseban ditempatkan penjaga dengan atap alang-alang atau daun-daun sebangsa palem (mungkin kirai) dimana mereka mendengarkan audiensi. Pada suatu sudut terdapat masjid dan di samping itu sumur tempat mereka mencuci, masuk ke bagian agak dalam terdapat lorong-lorong dengan belokan-belokan atau sudut-sudut, tempat tinggal budak-budak atau maksud pencegahan serangan musuh di waktu malam. Rumah-rumah mereka mempunyai 4,8 atau 10 tiang dibuat dari kayu yang dikerjakan halus dan atapnya dari daun-daun sejenis palem, sedang di bawahnya (langit-langit) sama sekali terbuka supaya dingin, meskipun terdapat jendela-jendela.¹⁴⁸

Demikian golongan-golongan elite dengan lapisannya yang berjumlah sangat kecil dibandingkan dengan golongan penduduk nonelite. Tetapi bagaimanapun tetap ada hubungan antara satu dengan yang lainnya dan juga hubungan dengan raja, keluarga raja dan bangsawan karena hubungan kepentingan masing-masing di

¹⁴⁷ Kehidupan golongan elite yang jumlahnya terbatas serta menduduki status sosial yang tinggi itu berhubungan erat dengan status ekonomi yang tinggi pula. Dibandingkan dengan golongan nonelite bukan karena kehidupan ekonominya saja, namun juga kehidupan sosial-budaya umumnya. Misalnya mereka mempunyai corak atau gaya berpakaian sendiri, cara berbahasa, gelar-gelar yang dimilikinya, rumah-rumah mempunyai bentuk serta keadaan yang berbeda dengan orang golongan nonelite. Dalam berita asing antara lain dikatakan bahwa rumah-rumah bangsawan, pejabat-pejabat tinggi pemerintahan dibuat dari bahan-bahan bata dan bahan-bahan yang lebih kuat dan permanen, berukuran besar.

¹⁴⁸ Rouffaer dan Ijzerman, *De Erste Schipvaart der Nederlands naar Oost-Indie onder Cornelis de Houtman 1595-1597*, De Eerte Boeck van Willem Lodewijksz. Martinus Nijhoff, 1915, 107.

bidang sosial, ekonomi dan politik bahkan kepentingan keagamaan. Meskipun demikian, hubungan itu mempunyai batas tertentu dan agak kaku, disebabkan adat kebiasaan, ikatan darah dan lain-lain. Tetapi hubungan dengan golongan rakyat kebanyakan atau golongan nonelite, benar-benar menunjukkan perbedaan yang kaku dan terbatas, karena corak kehidupan sosial ekonomi serta adat kebiasaan lainnya merupakan pemisah antara kedua lapisan masyarakat tersebut.

3. Golongan Nonelite

Menurut Sartono Kartodirjo, apabila golongan elite merupakan lapisan masyarakat yang jumlahnya kecil dan terbatas, maka sebaliknya golongan orang kebanyakan yang kita sebut nonelite merupakan lapisan masyarakat yang besar jumlahnya. Golongan yang termasuk nonelite atau rakyat kebanyakan dalam masyarakat kerajaan di pulau Jawa disebut wong cilik.¹⁴⁹

Sedangkan menurut Gideon Sjoberg, Kebiasaan orang-orang golongan nonelite bertempat tinggal di dalam kota bukan hanya untuk mendapatkan perlindungan bahaya keamanan dan dapat mengadakan hubungan pribadi antar mereka tetapi juga untuk memperoleh keuntungan dari golongan pedagang, pelayan-pelayan, tukang-tukang, ahli-ahli astrologi, ahli-ahli musik, dan dari golongan lain-lainnya yang masing-masing memberikan pelayanan.¹⁵⁰ Tanpa rakyat kebanyakan atau nonelite, tentu golongan-golongan elite dan golongan yang termasuk lapisan masyarakat tersebut tidak akan dapat mempertahankan status sosial, ekonomi dan politik.

¹⁴⁹ Golongan wong cilik terdiri dari pedagang dan petani, dan orang-orang yang termasuk golongan nonelite adalah pejabat-pejabat birokrasi eselon bawah, golongan keagamaan yang melayani orang-orang biasa, anggota-anggota tentara, artis-artis dan golongan lainnya yang termasuk lapisan masyarakat bawah. Lihat Sartono Kartodirjo, *Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial*. (Yogyakarta: Lembara Sejarah, Universitas Gadjah Mada, 1969), 32.

¹⁵⁰ Gideon Sjoberg, *The Preindustrial City Past and Present*, London; The Free Press New York: Collier Macmillan Ltd., 1965, 115.

Sesuai dengan letak pusat-pusat kerajaan pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam yang umumnya di pesisir, maka banyak di antara lapisan penduduk merupakan golongan pedagang. Di Banten banyak pedagang yang datang, baik yang sementara maupun yang lebih lama tinggalnya. Seperti biasa dengan lamanya tinggal kemudian mereka mempunyai perkampungan masing-masing. Bagi pedagang asing penempatannya harus seizin penguasa kerajaan terlebih dahulu. Golongan pedagang yang tinggal di Banten antara lain orang-orang Melayu, Benggala, Gujarat dan Abesinia, bertempat tinggal disamping pantai. Pedagang-pedagang Cina juga mempunyai perkampungan sendiri yang terletak di sebelah barat, bergabung dengan orang-orang Portugis. Kelompok rumah orang-orang Belanda terpisah, terpagar kuat terhadap daratan, dan terdapat pula rawa-rawa.¹⁵¹

Menurut berita Belanda (1596), pedagang-pedagang Gujarat yang datang dan akan tinggal di Banten membeli wanita-wanita untuk melayani mereka siang dan malam, tetapi apabila mereka akan kembali ke negerinya, wanita-wanita itu dijual lagi. Apabila mereka mempunyai anak, maka anak-anak itu mereka bawa dan istri-istri bebas ditinggal di rumah masing-masing.¹⁵² Sedangkan pedagang-pedagang Cina yang menetap di Banten menampung hasil lada dari pedalaman yang dijual oleh para petani.

Pada abad ke-16 datang orang-orang Portugis, kemudian abad ke-17 orang-orang Inggris dan Belanda, selanjutnya orang-

¹⁵¹Selain pedagang-pedagang asing tersebut masih terdapat pula pedagang-pedagang Arab, Pegu, Turki, Parsi, Dan juga berdatangan pedagang-pedagang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti dari Maluku, Ambon, Banda Selor, Makasar, Sumbawa. Dan dari Jawa antara lain dari Jaratan, Gresik, Pati, Juwana. Demikian pula halnya dari pedagang-pedagang daerah Sumatera. Lihat Rouffaer dan Ijzerman, *De Erste Schipvaart der Nenderlands naar Oost-Indie onder Cornelis de Houtman 1595-1597*, De Eerte Boeck van Willem Lodewijksz, Martinus Nijhoff, 1915, 108.

¹⁵²Rouffaer dan Ijzerman, *De Erste Schipvaart der Nenderlands naar Oost-Indie onder Cornelis de Houtman 1595-1597*, De Eerte Boeck van Willem Lodewijksz. Martinus Nijhoff, 1915, 121.

orang Prancis dan Denmark. Pedagang-pedagang dari Benua Asia berdiam di perkampungan-perkampungan kecil, sendiri-sendiri yang terdapat sepanjang Sungai.¹⁵³ Kedatangan golongan pedagang baik yang tinggal sementara maupun lebih lama di pusat kerajaan sangatlah diharapkan oleh golongan raja-raja, dengan demikian maka masuknya penghasilam, baik yang jatuh kepada raja maupun kepada golongan elite. Para pedagang baik dari antar daerah kerajaan di Indonesia maupun dengan negeri-negeri lain di luarnya, tidak terlepas dari peraturan yang mengharuskan membayar bea cukai. Apabila perdagangan pada waktu itu dimonopoli kerajaan.¹⁵⁴ Pelaksanaan pemungutan biaya bea cukai tersebut dilakukan oleh pejabat yang diangkat seperti syahbandar dan pejabat-pejabat di bawahnya.

Prinsip perdagangan adalah keuntungan, oleh sebab itu mereka anggap penting untuk mengusahakan mendapat perlindungan dari golongan penguasa dan golongan elite. Akan tetapi bagi golongan elite politik misalnya mereka tidak selalu puas dengan apa yang mereka peroleh dari para pedagang melalui cukai. Golongan elite politik kadang-kadang mengawasi hak para pedagang. Ada di antara penguasa meminjam harta milik pedagang dan menolak membayar kembali. Kadang-kadang dengan cara menjaminkan anak laki-laki bangsawan kepada anak-anak perempuan pedagang. Pedagang-pedagang yang kaya raya juga dapat menyisihkan kekayaannya untuk diberikan kepada raja dan bangsawan sebagai penukaran untuk gelar bangsawan.¹⁵⁵

Pedagang-pedagang asing pada umumnya lebih sukar untuk melakukan perdagangan ke luar kota atau perdagangan. Karena itu kemungkinan besar pedagang-pedagang kecil pribumilah yang menjadi perantara. Mereka membawa barang-barang dagangan dari

¹⁵³ Arun Kumar Dasgupta, *Acheh In Indonesian Trade and Politics: 1600-1641*. Cornell University, Februari, 1962, 82-83.

¹⁵⁴ Van Leur, *Indonesian Trade And Society*. (The Hague Bandung: Van Hoeve, 1955), 133.

¹⁵⁵ Gerhard Lenski, *Power and Privilege: A teory of Social Stratification*. New York, McGraw-Hill Book, 1966, 253.

desa-desa yang diperolehnya dari hasil produksi untuk ekspor. Sebaliknya barang-barang impor seperti pakaian yang diperlukan masyarakat pedesaan dapat dibawa pedagang-pedagang kecil pribumi dan menjualnya kepada petani-petani. Tetapi boleh jadi petani sendiri yang datang ke kota untuk menjual hasilnya. Antara lain petani-petani penjual lada di kota Banten.¹⁵⁶ Sementara menunggu saatnya di ekspor. Di antara pedagang-pedagang lada ini terdapat kaum wanita. Dan menarik perhatian bahwa ada pedagang-pedagang Cina yang mendatangi daerah pedalaman kota Banten, langsung membeli lada dari petani.

Golongan petani rupa-rupanya tidak banyak yang bertempat tinggal di dalam kota pusat kerajaan maritime dan kota pelabuhan. Di atas telah dikatakan bahwa di Banten ada beberapa petani wanita maupun laki-laki yang menjual lada di pasar. Dan di dalam *Sajarah Banten* terdapat cerita bagaimana sultan memerintahkan ponggawa-ponggawa di Surosowan mengadakan pemeriksaan sawah-sawah (seserangan) yang tidak jauh dari pusat kota.¹⁵⁷ Di Banten, di luar puing-puing bekas keraton dapat dilihat banyak pesawahan wakaf, terutama sekitar Tasikardi. Pemilik-pemiliknya mungkin keluarga sultan atau golongan bangsawan, meskipun yang mengerjakan sawah tersebut yaitu petani-petani yang tinggal di sekitar wilayah itu.

Masyarakat pesisir yang merupakan kota kerajaan dan pelabuhan adalah tempat-tempat yang sesuai untuk kehidupan nelayan atau pencari ikan. Golongan ini juga besar artinya bagi kehidupan perekonomian kerajaan, dan hasil-hasilnya mereka jual kepada masyarakat kota, terutama kepada orang-orang lapisan atas

¹⁵⁶Sebagaimana diceritakan oleh Willem Lodewyckzs pada masa-masa Cornelis de Houtman di Banten, lada atau merica hasil pembelian dari kota dan daerah-daerah sekitarnya itu oleh pedagang-pedagang besar dikumpulkan dalam gudang-gudang. Lihat Rouffaer dan Ijzerman, *De Erste Schipvaart der Nenderlands naar Oost-Indie onder Cornelis de Houtman 1595-1597*. De Eerte Boeck van Willem Lodewijksz, Martinus Nijhoff, 1915, 110.

¹⁵⁷Husein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sadjarah Banten*. (Jakarta: Djambatan, 1983). 55.

yang biasanya memerlukan bahan makanan yang lebih sempurna daripada rakyat kebanyakan. Di antara golongan nelayan tersebut sudah tentu banyak yang tidak memiliki peralatan sendiri seperti perahu, dengan demikian mereka terpaksa harus menyewa alat-alat itu atau mereka sama sekali hanya berfungsi sebagai pelaksana, karena semua modal dari orang-orang lapisan atas atau elite dan dari keluarga bangsawan.¹⁵⁸

Golongan tukang atau mungkin lebih tepat disebut golongan pekerja, dalam golongan masyarakat mereka antara lain, tukang gerabah, tukang-tukang yang pekerjaannya berhubungan dengan perkayuan seperti tukang ukir, pahat dan lain-lain. Seperti tukang-tukang pembuat perkakas dan perhiasan dari bahan-bahan logam seperti pandai emas, pandai besi dan lain-lain. Perkampungan mereka biasanya juga tersendiri. Melalui beberapa tukang ahli orang-orang asing itu, masuklah pengaruh gaya bangunan dan benda-benda lainnya yang berunsur Eropa ke dalam budaya Indonesia, mekipun semula terbatas pada masyarakat Jakarta sejak abad ke-17.

Menarik perhatian bahwa budaya Indonesia menurut selera kerajaan masing-masing tetap menjadi dasar perkembangannya. Bahkan sekalipun orang-orang sudah memeluk agama Islam, tampak dengan jelas unsur bangunan, ukiran, hiasan, dasarnya mencerminkan budaya pra-Islam, seperti terlihat pada Masjid, Keraton dan bangunan yang lainnya. Golongan yang termasuk nonelite lainnya ialah tentara bawahan, orang-orang keagamaan, pejabat-pejabat pemerintahan dari golongan bawahan. Berdasarkan sumber-sumber asing atau babad hikayat dan cerita tradisional, kerajaan-kerajaan di Indonesia dalam waktu perang biasanya

¹⁵⁸ Dengan demikian nelayan-nelayan tersebut hidup tergantung kepada masyarakat lapisan atas. Kalaupun memiliki peralatan perangkap ikan sendiri dan menjual hasilnya ke pasar-pasar, sering kali harus menjual melalui tengkulak-tengkulak dari golongan masyarakat pemilik modal. Maka dari pada itu kehidupan ekonomi nelayan pada umumnya masih tetap di bawah. Mobilitas sosial kurang memberikan kesempatan dan mungkin terbatas pada mobilitas horizontal.

menghimpun jumlah besar tentara. Sedangkan dalam waktu biasanya jumlah tentara tidak begitu banyak.¹⁵⁹

4. Golongan Budak

Golongan-golongan budak sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, mereka berdiam di rumah-rumah bangsawan atau elite birokrat, dan istana raja-raja, sebagai penjaga-penjaga, atau pesuruh. Orang-orang tersebut biasanya golongan di luar lapisan masyarakat bawah atau nonelite. Beberapa sarjana antara lain Gideon Sjoberg, memasukan mereka pada golongan “*outcast*”.¹⁶⁰ Sedangkan G.E Lenski memasukkannya pada “*unclean class*”.¹⁶¹ Mereka termasuk orang-orang yang melakukan pekerjaan berat, menjual tenaga atau fisik, mengerjakan pekerjaan kasar. Golongan yang termasuk budak atau abdi, kawula, hamba dan lain-lain, tidak hanya terdiri dari laki-laki saja tetapi juga perempuan. Keberadaan golongan budak disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya seseorang tidak bisa membayar hutang sehingga

¹⁵⁹ Golongan nonelite keagamaan atau orang-orang biasa yang hidupnya terutama dilapangan keagamaan bahkan mungkin pencaharian hidupnya juga dari itu, antara lain guru-guru agama yang disebut kiyai, ulama dan mantra. Mereka berpengaruh besar dalam kehidupan sosial, bahkan mempunyai pengaruh dibidang politik, lebih-lebih kelak di zaman colonial sering kali membentuk gerakan-gerakan politik di bawah kiyai-kiyai atau ulama-ulama untuk merongrong bahkan melawan kewibawaan pemerintah kolonial. Golongan nonelite lainnya yang ada di masyarakat Banten adalah golongan fungsionaris kerajaan tingkat bawahan (priyayi cilik). Golongan nonelite birokrat itu pada umumnya mereka yang ada di bawah mantra-mantri, tumenggung, adipati, ponggawa dan lainnya. Golongan seperti itu dalam beberapa hal dapat pula mempunyai kesempatan untuk mobilitas vertical, sehingga menjadi elite birokrat. Lihat Uka Tjandrasasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII Sampai XVIII Maschi*. (Kudus: Menara Kudus, 2000).

¹⁶⁰ Gideon Sjoberg, *The Preindustrial City Past and Present*. London: The Free Press New York: Collier Macmillan Ltd, 1965, 235.

¹⁶¹ Gerhard Lenski, *Power and Privilege: A teory of Social Stratification*. New York, McGraw-Hill Book, 1966, 281.

anak atau kerabatnya diberikan sebagai pembayaran hutang kepada tuannya, disebabkan menjadi tawanan perang dan khusus ada perdagangan budak. Masalah perbudakan mungkin merupakan tradisi jauh sebelum pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia.¹⁶²

Masalah perbudakan sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tetapi juga meliputi berbagai Negara di Asia, Eropa dan Afrika. Di Arab sejak sebelum masa Islam ada perbudakan meskipun pada masa timbulnya Islam ada pembatasan mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap budak-budak itu. Demikian pula di negeri-negeri Islam lainnya, seperti Mesir, Iran, Turki terdapat perdagangan budak. Meskipun demikian perdagangan budak masih terus berlangsung, bahkan di Indonesia sampai abad ke-19.¹⁶³ Walaupun orang-orang yang termasuk golongan budak menempati kedudukan sosial yang rendah sekali, namun mereka diperlakukan oleh golongan raja, bangsawan serta elite untuk melayani kepentingan-kepentingannya. Pembuatan Keraton, bangunan-bangunan kota, pembuatan jalan dan pekerjaan berat lain yang memerlukan fisik kuat biasanya menggunakan tenaga golongan budak.

Seperti halnya di Banten, menurut Willem Lodewycksz golongan-golongan pedagang besar, bangsawan-bangsawan di Banten mempunyai budak-budak untuk menjaga rumah. Mereka juga tinggal di rumah-rumah majikannya. Diceritakan pula bahwa apabila hari puasa yang lamanya 30 hari Ramadhan berakhir, budak-budak juga mencontoh atasannya itu. Peristiwa itu terjadi pada setiap tahun pada hari kelima bulan Agustus. Diceritakan bahwa

¹⁶²Pada zaman Majapahit, ketika duta Majapahit berkunjung ke negeri Cina, ia membawa budak sebagai persembahannya, disamping membawa mutiara dan lada. Pada tahun 1637 duta dari arakan juga mengirim sepuluh orang budak kepada Gubernur Jendral kompeni.

¹⁶³Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*. (Cambridge: The University Press, 1969), 88.

pada saat itu pula dilangsungkan perkawinan di antara mereka dan kadang-kadang juga dengan selain budak.¹⁶⁴

Pada waktu orang-orang Belanda berlayar menuju Banten (1506) mereka melihat Jung atau kapal yang menyerupai kapal mereka sendiri, kecuali mempunyai emperan belakang tempat budak-budak dan pendayung-pendayung duduk dan tertutup kuat di atas mereka, dicek ditempati tentara-tentara agar mereka lebih merasa nyaman dan bebas berperang. Mungkin budak-budak itu adalah tawanan perang. Beberapa waktu setelah didirikannya kota Batavia 1619 oleh Kompeni Belanda, dikarenakan keadaan yang penting, maka merasa perlu orang-orang Kompeni menggunakan budak-budak. Sebagian besar budak tersebut diimpor dari Benggala Arakan. Malabar, terutama dari pesisir Koromandel di mana perang, perampokan di laut bahaya kelaparan selalu mengancam. Jika ditarik kesimpulan, dilihat dari sudut status sosial, golongan budak pada umumnya merupakan orang-orang di luar lapisan nonelite. Nasib mereka sama seperti halnya binatang yang diperjualbelikan. Mereka harus taat kepada majikannya, tetapi terpaksa kalau mereka tidak disenangi suatu waktu dapat dijual kembali kepada orang lain.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Lihat Rouffaer dan Ijzerman, *De Erste Schipvaart der Nederlands naar Oost-Indie onder Cornelis sde Houtman 1595-1597*. De Eerte Boeck van Willem Lodewijksz, Martinus Nijhoff, 1915, 115.

¹⁶⁵ Akan tetapi ada pula di antara budak-budak tersebut bernasib lebih baik dan dapat bebas dari tekanan hidup, seperti mereka terpakai dijadikan pembantu, tukang-tukang kayu, tukang sepatu dan lain sebagainya. Dan di antara mereka yang mendapat prestasi kerja baik, tentu mendapat kepercayaan majikannya, sehingga lambat laun bisa menggantikan kedudukan majikannya, dikalangan budak belian yang dijadikan tentara, serta bakat dan ketekunannya dapat mencapai jabatan lebih tinggi daripada prajurit. Dalam sejarah Indonesia, Untung Surapati, sebagai budak belian yang berhasil menjadi letnan Kompeni Belanda. Tetapi karena ketidakpuasan, ia melarikan diri dan memimpin pasukan untuk memberontak terhadap kompeni Belanda. Lihat Uka Tjandrasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII Sampai XVIII Maschi*. (Kudus: Menara Kudus, 2000).

Dalam sejarah Timur Tengah, sekitar Laut Tengah dan India, tidak sedikit budak yang mencapai status sosial-ekonomi dan politik yang tinggi, bahkan di antaranya ada yang berhasil menjadi Sultan. Jadi bisa disimpulkan ada budak-budak yang dapat menduduki status sosial lebih tinggi karena mobilitas vertikal. Hubungannya dengan bangsawan elite dan nonelite tidak dapat dipungkiri meskipun terbatas pada pelayanan untuk kelancaran hidup sehari-hari golongan atas.¹⁶⁶

¹⁶⁶Lihat Husein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sadjarah Banten*. (Jakarta: Djambatan, 1983).